

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen



**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya**

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Alex J. Sinaga
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Angrek Nelimurni B-70 No. 38 Kelurahan Kemanggisan
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
Nomor Telepon : (022) 452 7101
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Harry M. Zen
Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
Alamat Domisili : Jl. Zeni AD VI No. 4 Kelurahan Rawajati
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (022) 452 7201/ 021 520 9824
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2018



A handwritten signature of Alex J. Sinaga is on the left, and a handwritten signature of Harry M. Zen is on the right. Both signatures are in blue ink. In the center, there is a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) for 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text 'METERAI TEMPEL', 'E2BBBADF222657364', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

**Alex J. Sinaga
Direktur Utama**

**Harry M. Zen
Direktur Keuangan**



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3-4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-130

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5841/PSS/2018

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-5841/PSS/2018 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja



David Sungkoro, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0691

12 Maret 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2e,2u,3,31,37	25.145	29.767
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2e,2u,4,31,37	2.173	1.471
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,2ab,5,37		
Pihak berelasi	2c,31	1.545	894
Pihak ketiga		7.677	6.469
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,37	342	537
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	2h,6	631	584
Aset tersedia untuk dijual	2j,9	10	3
Pajak dibayar di muka	2t,26	1.947	2.138
Tagihan restitusi pajak	2t,26	908	592
Aset lancar lainnya	2c,2i,2m,7,31	7.183	5.246
Jumlah Aset Lancar		<u>47.561</u>	<u>47.701</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	2f,2u,8	2.148	1.847
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2l,2m,2aa,9,34	130.171	114.498
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	2s,29	-	199
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,2n,2aa,11	3.530	3.089
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,26	2.804	769
Aset tidak lancar lainnya	2c,2g,2i,2n,2u,2t,10,26,31,37	12.270	11.508
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>150.923</u>	<u>131.910</u>
JUMLAH ASET		<u>198.484</u>	<u>179.611</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2o,2u,12,37		
Pihak berelasi	2c,31	896	1.547
Pihak ketiga		14.678	11.971
Utang lain-lain	2u,37	217	172
Utang pajak	2t,26	2.790	2.954
Beban yang masih harus dibayar	2c,2u,13,31,37	12.630	11.283
Pendapatan diterima di muka	2r,14	5.427	5.563
Uang muka pelanggan	2c,31	1.240	840
Utang bank jangka pendek	2c,2p,2u,15a,31,37	2.289	911
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,15b,31,37	5.209	4.521
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>45.376</u>	<u>39.762</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,26	933	745
Pendapatan diterima di muka	2r,14	524	425
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,30	758	613
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2s,29	10.195	6.126
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u,16,31,37	27.974	26.367
Liabilitas lainnya	2u,2o	594	29
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>40.978</u>	<u>34.305</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>86.354</u>	<u>74.067</u>
EKUITAS			
Modal saham	1c,18	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2v,19	4.931	4.931
Modal saham yang diperoleh kembali	2v,20	(2.541)	(2.541)
Komponen ekuitas lainnya	2f,2u,21	387	339
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	28	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		69.559	61.278
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk - bersih		92.713	84.384
Kepentingan nonpengendali	2b,17	19.417	21.160
JUMLAH EKUITAS		<u>112.130</u>	<u>105.544</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>198.484</u>	<u>179.611</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN	2c,2r,22,31	128.256	116.333
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2r,24,31	(36.603)	(31.263)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,9,11	(20.446)	(18.532)
Beban karyawan	2c,2r,2s,23,31	(13.529)	(13.612)
Beban interkoneksi	2c,2r,31	(2.987)	(3.218)
Beban umum dan administrasi	2c,2r,25,31	(5.260)	(4.610)
Beban pemasaran	2c,2r,31	(5.268)	(4.132)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2q	51	(52)
Penghasilan lain-lain	2l,2r,9c	1.039	750
Beban lain-lain	2r,9c	(1.320)	(2.469)
LABA USAHA		43.933	39.195
Penghasilan pendanaan	2c,31	1.434	1.716
Biaya pendanaan	2c,2p,2r,31	(2.769)	(2.810)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	2f,8	61	88
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		42.659	38.189
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,26		
Pajak kini		(11.357)	(10.738)
Pajak tangguhan		1.399	1.721
		(9.958)	(9.017)
LABA TAHUN BERJALAN		32.701	29.172
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2f,2q,21	24	(40)
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u,21	20	0
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	2f,8	(1)	(1)
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Rugi aktuarial - bersih	2s,29	(2.375)	(2.058)
Penghasilan komprehensif lain - bersih		(2.332)	(2.099)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		30.369	27.073
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		22.145	19.352
Kepentingan nonpengendali	2b,17	10.556	9.820
		32.701	29.172
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		19.952	17.331
Kepentingan nonpengendali	2b	10.417	9.742
		30.369	27.073
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)	2x,27		
Laba bersih per saham		223,55	196,19
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)		22.354,64	19.619,11

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal saham	Tambahkan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih		
						Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2017		5.040	4.931	(2.541)	339	15.337	61.278	84.384	21.160	105.544
Penambahan setoran modal		-	-	-	-	-	-	-	50	50
Akuisisi bisnis	2d	-	-	-	4	-	-	4	-	4
Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	145	145
Dividen kas	2w,28	-	-	-	-	-	(11.627)	(11.627)	(12.355)	(23.982)
Laba tahun berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	22.145	22.145	10.556	32.701
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	44	-	(2.237)	(2.193)	(139)	(2.332)
Saldo, 31 Desember 2017		5.040	4.931	(2.541)	387	15.337	69.559	92.713	19.417	112.130

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk							Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
		Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah bersih		
						Ditetapkan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 1 Januari 2016		5.040	2.935	(3.804)	508	15.337	55.120	75.136	18.292	93.428
Penambahan setoran modal		-	-	-	-	-	-	-	183	183
Akuisisi bisnis	2d	-	-	-	-	-	-	-	10	10
Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali	1d	-	-	-	(129)	-	-	(129)	(9)	(138)
Dividen kas	2w,28	-	-	-	-	-	(11.213)	(11.213)	(7.058)	(18.271)
Modal saham yang diperoleh kembali	20	-	1.996	1.263	-	-	-	3.259	-	3.259
Laba tahun berjalan	2b,17	-	-	-	-	-	19.352	19.352	9.820	29.172
Penghasilan komprehensif lain - bersih	2f,2q,2s,2u,17	-	-	-	(40)	-	(1.981)	(2.021)	(78)	(2.099)
Saldo, 31 Desember 2016		5.040	4.931	(2.541)	339	15.337	61.278	84.384	21.160	105.544

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari:			
Pelanggan		117.719	113.288
Operator lain		7.392	2.828
Jumlah penerimaan kas dari pelanggan dan operator lain		125.111	116.116
Pendapatan bunga diterima		1.431	1.736
Pembayaran kas untuk beban		(49.604)	(42.433)
Pembayaran kas kepada karyawan		(11.739)	(11.207)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(11.846)	(11.304)
Pembayaran beban bunga		(3.133)	(3.455)
Pembayaran pajak pertambahan nilai - bersih		(1.942)	(2.696)
Penerimaan restitusi pajak		585	-
Penerimaan kas lainnya - bersih		542	474
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		49.405	47.231
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Pencairan deposito berjangka dan aset keuangan tersedia untuk dijual - bersih		-	2.159
Hasil dari penjualan aset tetap	9	1.367	765
Hasil dari klaim asuransi	9	155	60
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	8	28	23
Pembelian aset tetap	9,39	(32.294)	(26.787)
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(490)	(1.338)
Pembelian aset takberwujud	11,39	(508)	(1.098)
Penempatan deposito berjangka dan aset keuangan tersedia untuk dijual		(676)	(983)
Pembelian kepemilikan pada entitas anak dari kepentingan nonpengendali	1d	-	(138)
Akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh	1d	(243)	(137)
Penambahan penyertaan jangka panjang	8	(269)	(43)
Pembelian aset lainnya		(77)	(40)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(33.007)	(27.557)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pencairan utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	12.169	7.479
Penjualan saham yang diperoleh kembali	20	-	3.259
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		50	183
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	28	(11.627)	(11.213)
Pembayaran utang bank dan pinjaman lainnya	15,16	(9.289)	(10.555)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(12.355)	(7.058)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		(21.052)	(17.905)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(4.654)	1.769
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		32	(119)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	29.767	28.117
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	25.145	29.767

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 18).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan dan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara, penambahan kegiatan usaha utama dan penunjang Perusahaan, penambahan hak khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, perubahan ketentuan tentang pembatasan wewenang Direksi terkait tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tindakan pengurusan Perusahaan serta penyempurnaan redaksi dan sistematika Anggaran Dasar bertalian dengan penambahan substansi Anggaran Dasar, berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 16 tanggal 16 Mei 2017. Perubahan terakhir telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0146625 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Keputusan Menkumham No. AHU-0013024.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

a. Usaha utama:

- i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual atau menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

b. Usaha penunjang:

- i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- iii. Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (“Menkominfo”), evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (“DJPPPI”) sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“DJPT”).

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No. Izin	Jenis Jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penerbitan uang elektronik	Izin Bank Indonesia 11/432/DASP	Penerbit uang elektronik	3 Juli 2009
Izin penyelenggaraan pengiriman uang	Izin Bank Indonesia 11/23/bd/8	Penyelenggaraan pengiriman uang	5 Agustus 2009
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet	331/KEP/DJPPI/ KOMINFO/9/2013	Jasa interkoneksi internet	24 September 2013
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	127/KEP/DJPPI/ KOMINFO/3/2016	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	30 Maret 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	839/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	844/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap tertutup	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional	846/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap sambungan internasional	16 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	948/KEP/ M.KOMINFO/05/2016	Jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit switched</i>	31 Mei 2016
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	191/KEP/DJPPI/ KOMINFO/10/2016	Jasa sistem komunikasi data	31 Oktober 2016
Izin penyelenggaraan jasa akses internet	2176/KEP/ M.KOMINFO/12/2016	Jasa akses internet	30 Desember 2016
Izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten	1040/KEP/ M.KOMINFO/16/2017	Jasa penyediaan konten	16 Mei 2017

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary, dan Karyawan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris No. 28 tanggal 21 April 2017 oleh Ashoya Ratam., S.H., Mkn., dan RUPST yang dinyatakan dalam akta notaris No. 50 tanggal 22 April 2016 oleh Ashoya Ratam., S.H., Mkn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Komisaris Utama	Hendri Saporini	Hendri Saporini
Komisaris	Rinaldi Firmansyah	Dolfie Othniel Fredric Palit
Komisaris	Hadiyanto	Hadiyanto
Komisaris*	-	Pontas Tambunan
Komisaris Independen	Margiyono Darsasumarja	Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	Dolfie Othniel Fredric Palit	Margiyono Darsasumarja
Komisaris Independen	Pamiyati Pamela Johanna	Pamiyati Pamela Johanna
Komisaris Independen	Cahyana Ahmadjayadi	-
Direktur Utama	Alex Janangkih Sinaga	Alex Janangkih Sinaga
Direktur Keuangan	Harry Mozarta Zen	Harry Mozarta Zen
Direktur <i>Digital and Strategic Portfolio</i>	David Bangun	Indra Utoyo
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Dian Rachmawan	-
Direktur <i>Wholesale and International Services</i>	Abdus Somad Arief	Honesti Basyir
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Herdy Rosadi Harman	Herdy Rosadi Harman
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Zulhelfi Abidin	Abdus Somad Arief
Direktur <i>Consumer Service</i>	Mas'ud Khamid	Dian Rachmawan

* Sesuai hasil RUPS tanggal 21 April 2017, Devy Wildasari Suradji diangkat sebagai Komisaris menggantikan Pontas Tambunan. Pada tanggal 22 Desember 2017, Devy Wildasari Suradji diangkat sebagai Direktur Pemasaran PT Angkasa Pura I berdasarkan SK-289/MBU/12/2017, sehingga masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Perusahaan telah berakhir demi hukum.

1. Komite Audit dan *Corporate Secretary*

Susunan Komite Audit dan *Corporate Secretary* Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017*</u>	<u>2016</u>
Ketua	Margiyono Darsasumarja	Rinaldi Firmansyah
Sekretaris	Tjatur Purwadi	Tjatur Purwadi
Anggota	Rinaldi Firmansyah	Margiyono Darsasumarja
Anggota	Dolfie Othniel Fredric Palit	Dolfie Othniel Fredric Palit
Anggota	Sarimin Mietra Sardi	Sarimin Mietra Sardi
Anggota	Cahyana Ahmadjayadi	Pontas Tambunan
<i>Corporate Secretary</i>	Andi Setiawan	Andi Setiawan

* Perubahan susunan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP/DK/2017 tanggal 28 April 2017.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary* dan Karyawan (lanjutan)

3. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 24.065 orang dan 23.876 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, tanggal 20 Juni 2008, dan tanggal 19 Mei 2011 para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III dan IV untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 20).

Pada tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007, Perusahaan melakukan pembelian saham kembali sebanyak 211.290.500 saham dari publik yang merupakan program pembelian kembali saham tahap pertama. Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan menjual kembali seluruh saham tersebut (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali tahap III (Catatan 20).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham seri B. Efektif tanggal 26 Oktober 2016, Perusahaan melakukan perubahan rasio *Depositary Receipt* dari 1 ADS mewakili 200 saham seri B menjadi 1 ADS mewakili 100 saham seri B (Catatan 18). Informasi laba bersih per ADS pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian telah disesuaikan dengan perubahan rasio ini.

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 31 Desember 2017, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatitkan pada BEI dan 60.783.743 ADS telah dicatitkan pada NYSE (Catatan 18).

Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan menerbitkan obligasi Rupiah kedua masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatitkan di BEI (Catatan 16b.i).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 16 Juni 2015, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp2.200 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun, Rp2.100 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Rp1.200 miliar untuk Seri C yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan Rp1.500 miliar untuk Seri D yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 16b.i).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sisa saham hasil pembelian kembali saham tahap III (Catatan 20).

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali saham hasil pembelian kembali saham tahap IV (Catatan 20).

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2017	2016	2017	2016
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication ("GSM")/ 26 Mei 1995	1995	65	65	85.748	89.781
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	13.606	10.689
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	13.275	10.020
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	9.125	7.147
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	5.716	5.098
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	99,99	99,99	5.641	4.333
PT PINS Indonesia ("PINS"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	3.473	3.146
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	100	1.871	1.015

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2017	2016	2017	2016
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa, dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	576	472
PT Metranet ("Metranet"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100	100	524	370
PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin"), Jakarta, Indonesia	Jasa pembayaran - kegiatan prinsipal, kegiatan <i>switching</i> , kliring, dan <i>settlement</i> / 3 November 2016	2016	100	100	225	15
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network</i> , <i>Access Point</i> (NAP), <i>Voice Over Data</i> (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	5	5

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2017	2016	2017	2016
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	6.064	4.289
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	3.048	2.566
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	2.122	1.860
PT Telkom Landmark Tower ("TLT"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	2.009	1.683
PT Metra Digital Media ("MD Media"), Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	99,99	99,99	1.106	684
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	907	629
TS Global Network Sdn. Bhd. ("TSGN"), Petaling Jaya, Malaysia	Jasa satelit/ 14 Desember 2017	1996	49	-	818	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung (lanjutan):

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2017	2016	2017	2016
Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	710	441
PT Metra Digital Investama ("MDI"), Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi/ 8 Januari 2013	2013	99,99	99,99	658	331
Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A., Dili, Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	639	755
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	99,99	99,99	303	227
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	100	100	273	204
PT Melon ("Melon"), Jakarta, Indonesia	Jasa penjualan konten digital/ 14 November 2016	2010	100	100	231	178
PT Metraplaza ("Metraplaza"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	203	325
PT Graha Yasa Selaras ("GYS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	178	174
Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., ("Telkom Australia"), Sydney, Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	123	161
PT Nutech Integrasi ("Nutech"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyedia sistem integrator/ 13 Desember 2017	2001	60	-	60	-
Telekomunikasi Indonesia International Inc., ("Telkom USA"), Los Angeles, USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	36	9
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta, Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	99,99	99,99	18	18
PT Nusantara Sukses Sarana ("NSS"), Jakarta, Indonesia	Jasa pengelolaan gedung dan hotel, dll/ 1 September 2014	-	99,99	99,99	-	-
PT Nusantara Sukses Realti ("NSR"), Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	-	99,99	99,99	-	-
PT Metra TV ("Metra TV"), Jakarta, Indonesia	Jasa penyiaran berlangganan/ 8 Januari 2013	2013	99,83	99,83	-	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(a) Metra

Berdasarkan akta notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., No. 10, 11, 12, 13 dan 14 tanggal 25 Mei 2016, Metra membeli 2.000 saham Ad Medika dari kepemilikan saham minoritas setara dengan 25% kepemilikan saham dengan harga sebesar Rp138 miliar.

Berdasarkan akta jual beli saham No. 10 dan 11 Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., tanggal 13 Desember 2017, Metra membeli saham PT Nutech Integrasi (Nutech) sebanyak 36.000 saham dengan harga perolehan sebesar Rp24 miliar, setelah akuisisi Metra memiliki 60% porsi kepemilikan atas Nutech. Nilai harga perolehan tersebut lebih besar dibandingkan porsi kepemilikan pada nilai buku aset bersih yaitu sebesar Rp13 miliar. Per 31 Desember 2017, selisih tersebut, sebesar Rp11 miliar, dicatat sebagai *Goodwill* (Catatan 11). Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, penilaian nilai wajar sedang dalam proses penyelesaian.

(b) Telin

Pada tanggal 14 Desember 2017, Telin membeli 49% kepemilikan saham di TSGN sebesar MYR66.150.000 atau setara dengan Rp220 miliar. TSGN bergerak dalam jasa penyediaan sistem ICT (*Information and Communication Technologies*) untuk *satellite communication services, satellite bandwidth services* dan *VSAT services*. Kepentingan non-pengendali pada pihak akuisisi diukur pada nilai wajar. Berdasarkan *Sale and Subscription Agreement*, Telin memperoleh hak pengendali atas TSGN melalui penempatan dan penggantian 3 dari 5 manajemen kunci yang mengendalikan keseluruhan bisnis TSGN.

Akuisisi ini akan meningkatkan sinergi serta pendayagunaan aset dan sumber daya antar perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang lebih inovatif untuk pelanggan.

Nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah</u>
Aset	
Kas dan setara kas	21
Piutang usaha	18
Aset lancar lainnya	57
Aset tetap (Catatan 9)	711
Aset tidak lancar lainnya	14
Liabilitas	
Liabilitas jangka pendek	(422)
Liabilitas jangka panjang	(140)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	259
Nilai wajar atas kepentingan nonpengendali	(132)
<i>Goodwill</i> (Catatan 11)	93
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	220

Aset bersih yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2017 didasarkan penilaian sementara atas nilai wajar aset bersih. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, penilaian nilai wajar sedang dalam proses penyelesaian.

Sejak tanggal akuisisi hingga tanggal 31 Desember 2017, jumlah pendapatan dan laba sebelum pajak TSGN yang dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp13,5 miliar dan Rp12,1 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(c) Metranet

Pada tanggal 10 November 2016, Metranet melakukan peningkatan modal dasar dari semula senilai Rp244 miliar menjadi Rp325 miliar dengan mengeluarkan 18.800.000 lembar saham baru yang seluruhnya dimiliki oleh Perusahaan.

Berdasarkan akta notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., No. 08 dan 09 tanggal 14 November 2016, Metranet mengakuisisi 4.900.000 lembar saham Melon (setara dengan 49% kepemilikan) dari SK Planet Co. Ltd. dan 300.000 lembar saham Melon (setara dengan 3% kepemilikan) dari Metra, masing-masing dengan harga sebesar US\$13.000.000 atau setara dengan Rp170,4 miliar dan Rp13,2 miliar. Dari transaksi ini, Metranet memperoleh 52% kepemilikan atas Melon dan sisanya dimiliki oleh Metra.

(d) Jalin

Pada tanggal 3 November 2016, Perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) yang mendapat pengesahan dari Menkumham melalui surat keputusan nomor AHU-0050800.AH.01.01 tanggal 15 November 2016. Jalin bergerak dalam bidang ICT (*Information and Communication Technology*) yang berfokus pada usaha sistem pembayaran non-tunai yang mendukung *national payment gateway*.

(e) Sigma

Berdasarkan akta notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., No. 15 tanggal 29 Juni 2016, Sigma membeli saham PT Pojok Celebes Mandiri ("PCM") sebanyak 13.770 saham (setara dengan 51% kepemilikan saham) dari Metra dengan harga perolehan sebesar Rp7,8 miliar.

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 12 Maret 2018.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”, yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun belum Berlaku Efektif

Berlaku efektif 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
- Amandemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
Amandemen ini memberikan klarifikasi bahwa entitas mengalihkan properti ke, atau dari, penggunaan terjadi ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti adanya perubahan penggunaan. Secara terpisah, perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukkan perubahan penggunaan.
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
Amandemen ini:
 - Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.
 - Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.
 - Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.
 - Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar entitas akan mencapai hal tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

- Amandemen PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
Amandemen ini memberikan beberapa persyaratan akuntansi tambahan untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas sehubungan dengan efek dari kondisi *vesting* dan *non vesting*, transaksi pembayaran berbasis saham dengan fitur penyelesaian neto untuk kewajiban pemotongan pajak penghasilan, dan modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang mengubah klasifikasi dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
PSAK ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal, entitas dapat memilih untuk mengukur *investee*-nya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
PSAK ini mengklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Standar baru atau amandemen berikut, yang akan berlaku efektif 1 Januari 2018, tidak berdampak bagi laporan keuangan konsolidasian Grup:

- PSAK 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK 16: Agrikultur: Tanaman Produktif

Berlaku efektif 1 Januari 2019:

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
ISAK 33 mendefinisikan bahwa tanggal dimana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka adalah tanggal transaksi sebagaimana dimaksud PSAK 10 paragraf 22, yaitu tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, liabilitas atau penghasilan terkait (atau bagian darinya).

Berlaku efektif 1 Januari 2020:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan
PSAK 71 merevisi persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk model kerugian kredit ekspektasian untuk menghitung penurunan nilai aset keuangan, dan persyaratan akuntansi lindung nilai secara umum yang baru. PSAK ini tetap mempertahankan kriteria pengakuan dan penghentian pengakuan instrumen keuangan yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 71 menggantikan ketentuan akuntansi instrumen keuangan yang saat ini diatur dalam PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2020 (lanjutan):

- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**
PSAK 72 menetapkan kerangka yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan dan seberapa besar suatu pendapatan dapat diakui. PSAK ini memperkenalkan model lima langkah untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan kepada semua kontrak dengan pelanggan. PSAK ini juga memberikan panduan spesifik yang mewajibkan beberapa jenis biaya untuk mendapatkan dan atau memenuhi kontrak untuk dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis mengacu kepada transfer barang dan jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 menggantikan sejumlah standar akuntansi pendapatan yang ada saat ini, termasuk PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi dan ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan.

- **PSAK 73: Sewa**
PSAK 73 menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengukur seluruh sewa menggunakan model akuntansi tunggal yang sama dengan akuntansi sewa pembiayaan menurut PSAK 30. PSAK 73 memberikan dua pengecualian kepada penyewa terkait model akuntansi tersebut, yaitu untuk sewa dengan aset pendasar bernilai rendah dan sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pada saat dimulainya masa sewa, penyewa akan mengakui kewajiban untuk melakukan pembayaran sewa dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Penyewa juga secara terpisah akan mengakui beban bunga atas kewajiban sewa dan biaya penyusutan pada aset sewa.

Akuntansi untuk pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari akuntansi yang diatur dalam PSAK 30. Pesewa akan melanjutkan pengklasifikasian seluruh sewa berdasarkan prinsip klasifikasi sebagaimana yang saat ini diatur dalam PSAK 30.

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa dan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa.

- **Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**
Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2020 (lanjutan):

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi akan berlaku efektif 1 Januari 2022, namun amandemen tersebut tidak berdampak bagi laporan konsolidasian Grup

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki kendali. Pengendalian timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil.

Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak yang diperoleh atau dilepaskan selama periode berjalan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian hingga tanggal sejak Grup kehilangan pengendalian.

Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, meskipun hal ini akan mengakibatkan timbulnya saldo defisit pada kepentingan nonpengendali.

Saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada pemilik Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tersebut, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi bisnis terjadi, maka Grup akan melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut. Periode pengukuran berakhir segera setelah Perusahaan menerima informasi yang dicari tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi atau mempelajari bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh. Namun demikian, periode pengukuran tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham, dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interests*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Asosiasi adalah entitas dimana Grup (sebagai investor) memiliki pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan terkait kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tapi tidak termasuk kendali atau kendali bersama atas kebijakan operasional tersebut. Pertimbangan dalam menentukan pengaruh signifikan sama dengan pertimbangan saat menentukan pengendalian atas entitas anak.

Grup menghitung investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan dalam bagian investor atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diperkenankan diamortisasi ataupun pengujian penurunan nilai secara individu.
- b. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi entitas asosiasi. Setiap perubahan dalam penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi akan disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, jika ada perubahan yang langsung diakui dalam ekuitas entitas asosiasi maka Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba dan rugi belum direalisasi yang berasal dari transaksi antara Grup dan entitas asosiasi dieliminasi sejumlah porsi kepemilikan atas entitas asosiasi.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam "Penyertaan Jangka Panjang" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional PT Citra Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dolar A.S.") dan mata uang fungsional Telin Malaysia adalah Ringgit Malaysia ("RM"). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas kedua perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel, dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), pesawat telepon, modem *wireless broadband*, dan vaucer prabayar yang dibebankan pada saat dijual.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan, dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Jumlah penurunan nilai persediaan dibawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terutama terdiri dari piranti lunak. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, apabila ada. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	Tahun
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	4-8
Aset <i>Customer Premises Equipment</i> ("CPE")	4-5
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan disusutkan selama masa sewa.

Metode penyusutan, umur manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap (lanjutan)

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Grup melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi, bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Grup ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasikan untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Beban tanggungan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura, Telekomunikasi Indonesia International Inc., USA, dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S., Telekomunikasi Indonesia International Pty. Ltd., Australia yang menggunakan mata uang Dolar Australia dan TS Global Network Sdn. Bhd yang menggunakan Ringgit Malaysia. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2017		2016	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	13.565	13.570	13.470	13.475
Dolar Australia ("AU\$") 1	10.592	10.598	9.721	9.726
Euro 1	16.231	16.242	14.170	14.181
Yen Jepang 1	120,48	120,55	115,01	115,10
Ringgit Malaysia ("MYR") 1	3.520,35	3.525,97	3.003,79	3.007,59

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 21).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan telepon selular

Pendapatan dari jasa pascabayar, yang terdiri dari pendapatan pemakaian dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM dan vauzer perdana) dan vauzer isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vauzer prabayar telah habis masa berlakunya.

ii. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan reviu atas informasi historis dan tren pelanggan, Perusahaan menentukan taksiran jangka waktu hubungan dengan pelanggan adalah 23 tahun.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan lainnya

Pendapatan dari penjualan periferal atau perangkat telekomunikasi lainnya diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa menara telekomunikasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa sesuai kesepakatan dengan pelanggan.

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

vii. *Multiple-element arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan di atas.

viii. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

ix. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditanggung dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

x. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain

Imbalan pasca kerja terdiri dari program pensiun imbalan pasti yang *funded* dan *unfunded*, program pensiun iuran pasti, imbalan pasca kerja lainnya, program imbalan kesehatan pasca kerja imbalan pasti, program imbalan kesehatan kerja iuran pasti, dan kewajiban berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lain terdiri dari penghargaan masa kerja, cuti masa kerja, dan masa persiapan pensiun.

Perhitungan biaya terkait dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun imbalan pasti dan imbalan kesehatan pasca kerja serta polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nilai wajar polis asuransi adalah jumlah yang sama dengan kewajiban yang terkait (dan dapat dikurangi jika jumlah yang dapat diterima dari polis asuransi tidak dapat diperoleh secara penuh).

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto) diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan
- ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti (selain pembayaran imbalan sesuai dengan ketentuan program dan termasuk dalam asumsi aktuarial).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain (lanjutan)

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai bagian dari beban karyawan ketika terutang.

iii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Grup berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Grup agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Grup dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Grup telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

t. Pajak penghasilan ("PPH")

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak penghasilan (“PPH”) (lanjutan)

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Peraturan perpajakan Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46.

PPH final atas jasa konstruksi dan sewa disajikan sebagai bagian dari “Beban lain-lain”.

u. Instrumen Keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai (beban)/penghasilan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (piutang usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya).

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

b) investasi yang ditetapkan oleh Grup sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan

c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang dicatat sebagai "Aset Keuangan Lancar Lainnya", investasi di saham yang dicatat sebagai "Penyertaan Jangka Panjang", dan obligasi konversi yang dicatat sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitasnya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman dan liabilitas lainnya termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, dan pinjaman lainnya.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan liabilitas lainnya. Pinjaman termasuk utang bank jangka pendek, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, dan pinjaman lainnya.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut:

- a. situasi bisnis yang normal;
- b. peristiwa kegagalan; dan
- c. peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari Grup dan seluruh pihak lawan.

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Analisis nilai wajar instrumen keuangan dan rincian lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar diungkapkan dalam Catatan 37.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

v. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, Grup terlebih dahulu menilai apakah penurunan nilai terjadi secara individual untuk aset keuangan yang secara individu memang signifikan, atau secara gabungan apabila aset keuangan tersebut secara individu tidak signifikan. Jika Grup tidak menemukan bukti yang objektif atas penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individu, terlepas apakah signifikan maupun tidak, aset keuangan tersebut dimasukkan dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko kredit serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tidak diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (diluar rugi kredit yang diperkirakan muncul di masa depan yang belum terjadi saat ini). Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset berkurang melalui penggunaan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi atau grup investasi mengalami penurunan nilai. Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

vi. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahkan Modal Disetor".

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 100, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

y. Informasi segmen

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya direviu secara reguler oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup, misalnya Dewan Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk kontrak yang memberatkan diakui ketika kontrak tersebut menjadi memberatkan sebesar mana yang lebih rendah antara biaya neto memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika tidak memenuhi kontrak.

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

Penurunan nilai *goodwill* diuji setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan pada periode mendatang.

ab. Pertimbangan, estimasi, dan asumsi akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang memiliki dampak paling signifikan terhadap nilai yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian.

Informasi segmen

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi unit-unit bisnis berdasarkan kelompok pelanggan (disebut *Customer Facing Unit*) dan memiliki lima segmen dilaporkan sebagai berikut: *mobile, consumer, enterprise, wholesale and international business*, dan segmen lainnya. Grup telah menentukan segmen dilaporkan berdasarkan, antara lain, struktur organisasi serta komponen dari Grup yang hasil operasinya secara reguler direviu oleh Pengambil Keputusan Operasional (PKO) Grup. Grup juga telah menentukan Dewan Direksi sebagai PKO karena Dewan Direksi memonitor hasil operasi CFU secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan atas alokasi sumber daya dan menilai kinerja dari CFU.

Estimasi dan asumsi

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan dibawah ini.

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat pengembalian investasi. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

i. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 29 dan 30.

ii. Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan, dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan revaluasi atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 9.

iii. Provisi untuk penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 5.

iv. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 26.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	2017		2016		
	Saldo		Saldo		
	Mata uang	Mata uang	Mata uang	Mata uang	
	Rp	(dalam jutaan)	Setara Rupiah	(dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp	-	12	-	10
Bank					
Pihak berelasi					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp	-	1.481	-	1.897
	US\$	27	367	41	548
	JPY	7	1	6	1
	EUR	1	17	1	11
	HKD	1	2	1	1
	AUD	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Rp	-	968	-	581
	US\$	1	13	6	84
	EUR	0	6	5	68
	SGD	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Rp	-	466	-	95
	US\$	6	82	8	107
Lain-lain	Rp	-	21	-	22
	US\$	0	1	0	0
Sub-jumlah			<u>3.425</u>		<u>3.415</u>
Pihak ketiga					
PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")	Rp	-	278	-	14
	US\$	0	2	7	96
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC")	US\$	14	184	13	176
	HKD	4	6	2	4
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0
	US\$	11	154	6	74
	SGD	0	1	5	43
Development Bank of Singapore ("DBS")	Rp	-	24	-	101
	US\$	0	0	0	0
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	Rp	-	360	-	157
	US\$	4	61	5	69
	SGD	0	2	0	0
	EUR	1	20	0	1
	AUD	0	1	1	12
	TWD	8	4	3	1
	MYR	2	8	0	0
	HKD	0	0	0	0
	MOP	0	0	0	1
Sub-jumlah			<u>1.105</u>		<u>749</u>
Jumlah bank			<u>4.530</u>		<u>4.164</u>
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	5.315	-	4.043
	US\$	9	116	25	336
BRI	Rp	-	4.954	-	4.076
	US\$	15	203	47	632
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")	Rp	-	2.958	-	3.356
Bank Mandiri	Rp	-	446	-	1.552
	US\$	-	-	5	67
Sub-jumlah			<u>13.992</u>		<u>14.062</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

		2017		2016	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka (lanjutan)					
Pihak ketiga					
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")	Rp	-	1.726	-	2.020
PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	1.243	-	1.226
	US\$	-	-	14	185
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")	Rp	-	1.200	-	1.550
	US\$	-	-	10	134
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN")	Rp	-	676	-	461
	US\$	30	401	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	600	-	2.025
	US\$	2	31	-	-
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	Rp	-	-	-	1.345
	US\$	20	263	-	-
SCB	US\$	10	136	18	242
	SGD	-	-	15	139
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rp	-	91	-	305
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	Rp	-	22	-	148
Bank Permata	Rp	-	-	-	1.492
PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ")	Rp	-	5	-	200
	US\$	5	73	-	-
Lain-lain	Rp	-	97	-	59
	MYR	14	47	-	-
Sub-jumlah			6.611		11.531
Jumlah deposito berjangka			20.603		25.593
Jumlah			25.145		29.767

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Rupiah	2,85%-8,50%	3,20%-10,00%
Mata uang asing	0,40%-1,75%	0,10%-2,00%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	Mata uang	2017		2016	
		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka					
Pihak berelasi					
BRI	Rp	-	2	-	-
BNI	Rp	-	-	-	63
Pihak ketiga					
UOB	US\$	14	191	1	13
SCB	US\$	8	109	-	-
Lain-lain	Rp	-	23	-	-
Jumlah deposito berjangka			325		76
Aset keuangan tersedia untuk dijual					
Pihak berelasi					
PT Bahana TCW Investment Management ("Bahana TCW")	Rp	-	360	-	559
PT Mandiri Manajemen Investasi	Rp	-	711	-	500
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	US\$	-	-	4	55
Pemerintah	US\$	-	-	2	27
Lainnya	Rp	-	80	-	-
Sub-jumlah			1.151		1.141
Pihak ketiga	Rp	-	17	-	17
Jumlah aset keuangan tersedia untuk dijual			1.168		1.158
Rekening penampungan					
Rp		-	318	-	112
US\$		6	78	2	22
MYR		5	15	-	-
Lainnya					
Rp		-	263	-	98
US\$		0	6	-	-
MYR		0	0	-	-
AUD		0	0	0	5
Jumlah			2.173		1.471

Seluruh deposito berjangka di atas memiliki tanggal jatuh tempo lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:

	2017	2016
Rupiah	6,00%-7,00%	5,75%-6,00%
Mata uang asing	1,38%-1,64%	0,58%-1,64%

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha berhubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	2017	2016
BUMN	721	151
Indonusa	465	431
PT Indosat Tbk ("Indosat")	372	370
Lain-lain	670	348
Jumlah	2.228	1.300
Provisi penurunan nilai piutang	(683)	(406)
Jumlah bersih	1.545	894

(ii) Pihak ketiga

	2017	2016
Pelanggan individual dan bisnis Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	9.808	7.801
	1.517	1.252
Jumlah	11.325	9.053
Provisi penurunan nilai piutang	(3.648)	(2.584)
Jumlah bersih	7.677	6.469

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	2017	2016
Sampai dengan 3 bulan	1.405	690
3 sampai dengan 6 bulan	100	39
Lebih dari 6 bulan	723	571
Jumlah	2.228	1.300
Provisi penurunan nilai piutang	(683)	(406)
Jumlah bersih	1.545	894

(ii) Pihak ketiga

	2017	2016
Sampai dengan 3 bulan	6.809	5.566
3 sampai dengan 6 bulan	688	658
Lebih dari 6 bulan	3.828	2.829
Jumlah	11.325	9.053
Provisi penurunan nilai piutang	(3.648)	(2.584)
Jumlah bersih	7.677	6.469

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(iii) Umur total piutang usaha

	2017		2016	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	6.788	920	4.535	177
Jatuh tempo sampai dengan 3 bulan	1.426	281	1.721	401
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan	788	258	697	495
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	4.551	2.872	3.400	1.917
Jumlah	13.553	4.331	10.353	2.990

Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.354 miliar dan Rp3.005 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	2017	2016
Rupiah	2.187	1.300
Dolar A.S.	41	0
Lain-lain	0	0
Jumlah	2.228	1.300
Provisi penurunan nilai piutang	(683)	(406)
Jumlah bersih	1.545	894

(ii) Pihak ketiga

	2017	2016
Rupiah	10.300	7.565
Dolar A.S.	968	1.437
Dolar Australia	19	40
Lain-lain	38	11
Jumlah	11.325	9.053
Provisi penurunan nilai piutang	(3.648)	(2.584)
Jumlah bersih	7.677	6.469

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo awal	2.990	3.048
Provisi yang diakui selama tahun berjalan (Catatan 25)	1.494	743
Penghapusbukuan piutang	(153)	(801)
Saldo akhir	<u>4.331</u>	<u>2.990</u>

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp6.888 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15 dan 16c).

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PERSEDIAAN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Komponen	447	299
Kartu SIM dan vauzer Prabayar	168	168
Lain-lain	69	164
Jumlah	<u>684</u>	<u>631</u>
Provisi atas persediaan usang		
Komponen	(24)	(18)
Kartu SIM dan vauzer Prabayar	(29)	(29)
Lain-lain	0	0
Jumlah	<u>(53)</u>	<u>(47)</u>
Jumlah bersih	<u>631</u>	<u>584</u>

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo awal	47	41
Provisi yang diakui selama tahun berjalan	6	11
Penghapusbukuan persediaan	-	(5)
Saldo akhir	<u>53</u>	<u>47</u>

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.458 miliar dan Rp2.105 miliar (Catatan 24).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp231 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15, 16b dan 16c).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, modul dan komponen dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp143 miliar dan Rp199 miliar, yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Modul dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp256 miliar dan Rp220 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang muncul dari risiko yang ditanggung.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	2017	2016
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 34c.i)	3.760	3.056
Sewa dibayar di muka	1.349	1.234
Uang muka	1.156	389
Gaji dibayar di muka	227	229
Panjar kerja	35	32
Lain-lain	656	306
Jumlah	7.183	5.246

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

Grup memiliki penyertaan saham pada beberapa entitas sebagai berikut:

	2017						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian laba (rugi) bersih	Dividen	Bagian penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Tiphone ^a	24,00	1.488	-	80	(28)	(1)	1.539
Indonusa ^b	20,00	221	-	-	-	-	221
Teltranet ^c	51,00	38	-	(20)	-	-	18
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^e	49,00	42	-	1	-	-	43
PT Graha Sakura Nusantara ("GSN") ^g	45,00	-	14	0	-	-	14
Lain-lain ^f	25,00-49,00	-	4	(0)	-	(0)	4
Sub-jumlah		1.789	18	61	(28)	(1)	1.839
Penyertaan jangka panjang lainnya		58	251	-	-	-	309
Jumlah penyertaan jangka panjang		1.847	269	61	(28)	(1)	2.148

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2017:

	<u>Tiphone</u>	<u>Indonusa</u>	<u>Teltranet</u>	<u>ILCS</u>	<u>GSN</u>	<u>Lain-lain</u>
<i>Laporan posisi keuangan</i>						
Aset lancar	8.084	307	174	145	1	190
Aset tidak lancar	994	415	101	32	185	606
Liabilitas jangka pendek	(2.107)	(877)	(149)	(87)	(27)	(724)
Liabilitas jangka panjang	(3.255)	(177)	(90)	(2)	(129)	(1.882)
Ekuitas (defisit)	3.716	(332)	36	88	30	(1.810)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>						
Pendapatan	27.914	692	209	122	0	106
Beban operasional	(27.217)	(333)	(255)	(116)	(0)	(287)
Penghasilan (beban) lain-lain termasuk biaya pendanaan - bersih	(246)	(364)	(5)	(4)	(0)	(19)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	451	(5)	(51)	2	0	(200)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(116)	-	13	1	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	335	(5)	(38)	3	0	(200)
Laba (rugi) komprehensif lain	(3)	-	(0)	(0)	-	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	332	(5)	(38)	3	0	(200)

	2016						
	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan (pengurangan)</u>	<u>Bagian (rugi) laba bersih</u>	<u>Dividen</u>	<u>Bagian penghasilan komprehensif lain</u>	<u>Saldo akhir</u>
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Tiphone ^a	24,43	1.404	-	108	(23)	(1)	1.488
Indonusa ^b	20,00	221	-	-	-	-	221
Teltranet ^c	51,00	71	-	(33)	-	-	38
PT Melon Indonesia ("Melon") ^d	51,00	50	(67)	17	-	-	-
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^e	49,00	40	-	2	-	-	42
Lain-lain ^f	25,00-49,00	6	-	(6)	-	-	-
Sub-jumlah		1.792	(67)	88	(23)	(1)	1.789
Penyertaan jangka panjang lainnya		15	43	-	-	-	58
Jumlah penyertaan jangka panjang		1.807	(24)	88	(23)	(1)	1.847

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan investasi Grup yang diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas untuk tahun 2016:

	Tiphone	Indonusa	Teltranet	ILCS	Lain-lain
<i>Laporan posisi keuangan</i>					
Aset lancar	7.709	170	66	131	170
Aset tidak lancar	743	444	88	29	771
Liabilitas jangka pendek	(1.248)	(532)	(78)	(73)	(629)
Liabilitas jangka panjang	(3.762)	(405)	(2)	(1)	(1.212)
Ekuitas (defisit)	3.442	(323)	74	86	(900)
<i>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya</i>					
Pendapatan	27.310	605	66	116	139
Beban operasional	(26.445)	(583)	(149)	(112)	(264)
Penghasilan (beban) lain-lain					
termasuk biaya pendanaan - bersih	(231)	(17)	(3)	0	(88)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	634	5	(86)	4	(213)
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(166)	(33)	21	0	-
Laba (rugi) tahun berjalan	468	(28)	(65)	4	(213)
Laba (rugi) komprehensif lain	(5)	7	(0)	(0)	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	463	(21)	(65)	4	(213)

^a Tiphone berdiri pada 25 Juni 2008 dengan nama Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Tiphone bergerak di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar.

Nilai wajar penyertaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.755 miliar dan Rp1.500 miliar. Nilai wajar dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham dengan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.000 dan Rp855 per lembar saham.

Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Aset	9.078	8.452
Liabilitas	(5.362)	(5.010)
Aset bersih	3.716	3.442
Bagian grup atas aset bersih (24,00% tahun 2017 dan 24,43% tahun 2016)	892	841
Goodwill	647	647
Nilai tercatat penyertaan jangka panjang	1.539	1.488

^b Indonusa sebelumnya adalah entitas anak. Pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya. Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan Surat Sirkuler Pemegang Saham Indonusa yang tercakup dalam akta notaris No. 57 tanggal 23 April 2014 oleh FX Budi Santoso Isbandi, S.H., yang disetujui oleh Menkumham dalam Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, pemegang saham Indonusa menyetujui atas peningkatan jumlah saham yang diterbitkan dan dibayar penuh sejumlah Rp80 miliar. Perusahaan telah menggunakan haknya atas saham yang diterbitkan dan melakukan pengalihan ke Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33% dan kepemilikan Perusahaan atas Indonusa menjadi 15,67%.

^c Investasi pada Teltranet dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian antara Metra dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 29 Agustus 2014. Teltranet bergerak dalam bidang jasa sistem komunikasi. Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet.

^d Melon sebelumnya adalah entitas asosiasi. Pada tahun 2016, Perusahaan melalui Metranet membeli 49% saham Melon, sehingga menjadi entitas anak terkonsolidasi (Catatan 1d).

^e ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

^f Bagian kumulatif rugi atas investasi lain-lain yang tidak diakui pada tahun yang berakhir ada 31 Desember 2017 adalah Rp435 miliar

^g Pada tanggal 31 Agustus 2017, NSI dan pihak ketiga mendirikan GSN yang menjalankan usaha *real estate* dan pemasaran perumahan dan apartemen.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	1 Januari 2017	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2017
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.417	40	62	-	-	1.519
Bangunan	7.837	39	211	(3)	1.718	9.802
Renovasi bangunan sewa	1.116	-	34	(25)	132	1.257
Peralatan sentral telepon	20.490	69	556	(977)	(1.675)	18.463
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	1.586	-	-	-	(3)	1.583
Peralatan dan instalasi transmisi	121.552	-	2.420	(4.489)	14.314	133.797
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	8.445	573	1.233	(2.202)	1.251	9.300
Jaringan kabel	44.791	-	5.715	(694)	(2.657)	47.155
Catu daya	15.022	-	222	(456)	1.491	16.279
Peralatan pengolahan data	12.515	-	715	(602)	666	13.294
Peralatan telekomunikasi lainnya	700	-	966	(7)	-	1.659
Peralatan kantor	1.453	11	327	-	(234)	1.557
Kendaraan	387	-	65	(13)	-	439
Peralatan lainnya	100	-	-	-	(3)	97
Aset dalam pembangunan	4.550	-	20.110	(96)	(20.149)	4.415
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.354	-	228	-	-	5.582
Peralatan pengolahan data	84	-	-	(1)	-	83
Kendaraan	135	-	290	(24)	-	401
Peralatan kantor	76	-	-	(84)	88	80
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	215	-	-	-	-	215
Aset PBH	252	-	-	-	-	252
Jumlah	<u>248.099</u>	<u>732</u>	<u>33.154</u>	<u>(9.673)</u>	<u>(5.061)</u>	<u>267.251</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	2.435	-	407	-	38	2.880
Renovasi bangunan sewa	692	-	149	(23)	5	823
Peralatan sentral telepon	16.650	-	1.391	(977)	(2.511)	14.553
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	333	-	416	-	53	802
Peralatan dan instalasi transmisi	62.302	-	10.629	(3.642)	(49)	69.240
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	7.098	-	595	(2.202)	(1.157)	4.334
Jaringan kabel	20.301	-	1.992	(693)	(3.736)	17.864
Catu daya	10.164	-	1.274	(286)	2	11.154
Peralatan pengolahan data	9.468	-	1.372	(581)	(23)	10.236
Peralatan telekomunikasi lainnya	461	-	149	(7)	(1)	602
Peralatan kantor	846	-	189	(9)	10	1.036
Kendaraan	168	-	66	(8)	-	226
Peralatan lainnya	99	-	1	-	(4)	96
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	2.054	-	584	-	-	2.638
Peralatan pengolahan data	44	-	29	(1)	4	76
Kendaraan	32	-	47	(13)	-	66
Peralatan kantor	94	-	26	(56)	16	80
Aset CPE	19	-	1	-	-	20
Catu daya	98	-	22	-	-	120
Aset PBH	243	-	13	-	(22)	234
Jumlah	<u>133.601</u>	<u>-</u>	<u>19.352</u>	<u>(8.498)</u>	<u>(7.375)</u>	<u>137.080</u>
Nilai buku bersih	<u>114.498</u>	<u>-</u>	<u>13.802</u>	<u>(16.996)</u>	<u>(12.446)</u>	<u>130.171</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2016	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2016
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.270	89	59	(1)	-	1.417
Bangunan	6.033	10	311	(3)	1.486	7.837
Renovasi bangunan sewa	1.036	-	13	(37)	104	1.116
Peralatan sentral telepon	19.823	-	218	(160)	609	20.490
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	876	-	751	(41)	-	1.586
Peralatan dan instalasi transmisi	119.047	-	2.603	(11.319)	11.221	121.552
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	8.146	-	80	-	219	8.445
Jaringan kabel	37.887	-	6.746	(302)	460	44.791
Catu daya	13.822	-	161	(77)	1.116	15.022
Peralatan pengolahan data	11.351	12	318	(82)	916	12.515
Peralatan telekomunikasi lainnya	632	-	73	-	(5)	700
Peralatan kantor	1.062	5	139	(12)	259	1.453
Kendaraan	475	-	60	(147)	(1)	387
Peralatan lainnya	99	-	1	-	-	100
Aset dalam pembangunan	4.580	-	17.169	-	(17.199)	4.550
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.940	-	229	(815)	-	5.354
Peralatan pengolahan data	63	-	77	(56)	-	84
Kendaraan	94	-	63	(22)	-	135
Peralatan kantor	73	-	3	-	-	76
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Catu daya	90	-	125	-	-	215
Aset PBH	252	-	-	-	-	252
Jumlah	<u>232.673</u>	<u>116</u>	<u>29.199</u>	<u>(13.074)</u>	<u>(815)</u>	<u>248.099</u>

	1 Januari 2016	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2016
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	2.141	-	290	(2)	6	2.435
Renovasi bangunan sewa	623	-	106	(37)	-	692
Peralatan sentral telepon	15.223	-	1.588	(160)	(1)	16.650
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	4	-	329	-	-	333
Peralatan dan instalasi transmisi	63.063	-	9.957	(10.686)	(32)	62.302
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	6.706	-	415	-	(23)	7.098
Jaringan kabel	19.524	-	1.534	(302)	(455)	20.301
Catu daya	9.114	-	1.145	(70)	(25)	10.164
Peralatan pengolahan data	8.503	-	1.067	(62)	(40)	9.468
Peralatan telekomunikasi lainnya	385	-	77	-	(1)	461
Peralatan kantor	713	-	141	(11)	3	846
Kendaraan	166	-	69	(66)	(1)	168
Peralatan lainnya	99	-	-	-	-	99
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	2.327	-	542	(815)	-	2.054
Peralatan pengolahan data	53	-	47	(56)	-	44
Kendaraan	13	-	19	-	-	32
Peralatan kantor	51	-	43	-	-	94
Aset CPE	17	-	2	-	-	19
Catu daya	18	-	80	-	-	98
Aset PBH	230	-	13	-	-	243
Jumlah	<u>128.973</u>	<u>-</u>	<u>17.464</u>	<u>(12.267)</u>	<u>(569)</u>	<u>133.601</u>
Nilai buku bersih	<u>103.700</u>					<u>114.498</u>

a. Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2017	2016
Hasil penjualan aset tetap	1.367	765
Nilai buku bersih	(1.009)	(152)
Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	<u>358</u>	<u>613</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

b. Penurunan nilai aset

Pada tahun 2014, Grup telah memutuskan untuk menghentikan bisnis sambungan nirkabel tidak bergerak paling lambat 14 Desember 2015. Perusahaan menghitung jumlah terpulihkan adalah sebesar Rp549 miliar dan menentukan bahwa kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai lebih lanjut sebesar Rp805 miliar. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang menggunakan proyeksi arus kas dari anggaran keuangan terkini yang telah disetujui manajemen. Proyeksi arus kas ini mencakup arus kas yang akan diperoleh selama sisa periode layanan dan proyeksi arus kas neto yang akan diterima dari pelepasan kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak pada akhir periode layanan. Proyeksi arus kas bersih dari pelepasan kelompok aset dihitung dengan menggunakan metode pendekatan biaya disesuaikan dengan faktor keusangan fisik, teknologi dan ekonomis. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 13,5% yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Disamping itu, manajemen juga menggunakan asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis sebesar 30% berdasarkan data internal perusahaan, yang disebabkan kurang tersedianya data pasar sebanding karena sifat dari kelompok aset tersebut. Perhitungan nilai pakai paling terpengaruh terhadap asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis. Kenaikan tingkat keusangan teknologi dan ekonomis menjadi 40% akan menyebabkan tambahan penurunan nilai sebesar Rp70 miliar.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sehubungan dengan restrukturisasi unit bisnis jaringan telekomunikasi nirkabel tetap (Catatan 34c.i), Perusahaan melakukan percepatan pencatatan penyusutan aset bisnis sambungan nirkabel. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai aset bisnis sambungan nirkabel telah disusutkan secara penuh.

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan telah menghapusbukukan aset bisnis sambungan nirkabel yang telah disusutkan secara penuh dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp3.193 miliar dan Rp5.203 miliar.

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset dari UPK lainnya pada tanggal 31 Desember 2017.

c. Lain-lain

(i) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sejumlah Rp328 miliar dan Rp444 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi adalah berkisar antara 8,15%-11,00% dan 10,20%-11,00% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(iii) Pada tahun 2017 dan 2016, Grup telah mendapat klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp155 miliar dan Rp77 miliar dan dicatat sebagai bagian dari "Penghasilan Lain-Lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tahun 2017 dan 2016, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp7 miliar dan Rp19 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

(iv) Sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp3.115 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Telkomsel melakukan percepatan pencatatan penyusutan peralatan tersebut. Dampak penambahan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp459 miliar. Dampak perubahan program modernisasi tersebut di tahun 2018 adalah menurunkan laba sebelum pajak sebesar Rp47 miliar.

Pada tahun 2014, umur manfaat bangunan dan transmisi Telkomsel diubah masing-masing dari 20 tahun menjadi 40 tahun, dan dari 10 tahun menjadi 15 dan 20 tahun agar mencerminkan umur ekonomis bangunan dan transmisi pada saat ini. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp198 miliar. Dampak perubahan estimasi masa manfaat bangunan dan transmisi tersebut di tahun 2018 adalah meningkatkan laba sebelum pajak sebesar Rp135 miliar.

Pada tahun 2012, umur manfaat menara telekomunikasi Telkomsel diubah dari 10 tahun menjadi 20 tahun agar mencerminkan umur ekonomis menara telekomunikasi pada saat ini. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp92 miliar.

(v) Pertukaran aset tetap

Pada tahun 2012 dan 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off* masing-masing dengan PT Len Industri ("LEN") dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI").

Pada tahun 2017 dan 2016, Perusahaan telah menghapusbukukan aset jaringan tembaga dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp1 miliar dan Rp3 miliar dan telah mencatat aset jaringan *fiber optic* hasil pertukaran aset dengan nilai masing-masing sebesar Rp506 miliar dan Rp801 miliar.

Pada tahun 2017 dan 2016, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp816 miliar dan Rp636 miliar ditukarkan dengan peralatan Ericsson AB, PT Huawei Tech Investment ("PT Huawei") dan PT Nokia Solutions and Networks Indonesia ("PT NSN"). Pada tanggal 31 Desember 2017, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih Rp10 miliar akan ditukarkan dengan peralatan dari NSN Oy dan Huawei, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

- (vi) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.
- (vii) Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp118.198 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungan sebesar Rp11.449 miliar, US\$64 juta, HKD3 juta, SGD211 juta, dan MYR37 juta dan *first loss basis* sebesar Rp2.760 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.
- (viii) Pada tanggal 31 Desember 2017, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 67,24% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian sampai dengan Desember 2018. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (ix) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijamin dalam perjanjian obligasi (Catatan 16b.i). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp9.721 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 15 dan 16).
- (x) Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp53.407 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xi) Pada tahun 2017, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp30.344 miliar.
- (xii) Pada tanggal 25 Agustus 2017 Satelit Telkom-1 mengalami gangguan teknis yang berdampak pada gangguan layanan terhadap pelanggan, sehingga Perusahaan melakukan proses pemulihan dengan migrasi layanan pelanggan ke satelit Perusahaan lainnya (Telkom-3S dan Telkom-2), serta ke beberapa satelit pihak ketiga. Proses migrasi layanan pelanggan ini telah selesai dilakukan pada tanggal 10 September 2017, dan atas biaya yang timbul atas proses migrasi ini diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga perolehan dan akumulasi penyusutan Satelit Telkom-1 sebesar Rp1.165 miliar disajikan sebagai bagian dari kelompok aset yang dilepaskan dalam "Aset tidak lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (xiii) Telkomsel menandatangani perjanjian dengan perusahaan penyedia menara lainnya untuk penyewaan ruangan di menara telekomunikasi (slot) dan lokasi menara dengan jangka waktu selama 10 tahun. Telkomsel dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disamping itu, Grup juga memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
2017	-	987
2018	1.083	892
2019	969	816
2020	866	771
2021	778	740
2022	605	590
Selanjutnya	384	364
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	4.685	5.160
Bunga	(881)	(1.150)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	3.804	4.010
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)	(794)	(658)
Bagian jangka panjang (Catatan 16)	3.010	3.352

Rincian saldo kewajiban sewa guna usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.293	1.465
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.120	1.295
PT Solusi Tunas Pratama	212	241
PT Mandiri Utama Finance	198	-
PT Putra Arga Binangun	189	217
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	135	21
PT Bali Towerindo Sentra	100	112
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	557	659
Jumlah	3.804	4.010

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Klaim restitusi pajak jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 26)	3.085	1.428
Uang muka pembelian aset tetap	2.869	5.276
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	2.688	2.280
Izin penggunaan frekuensi - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	2.019	320
Pajak dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 26)	753	1.228
Beban tangguhan	413	387
Setoran jaminan	116	144
Lain-lain	327	445
Jumlah	12.270	11.508

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Sewa dibayar di muka merupakan pembayaran atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 40 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, beban tangguhan mencerminkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"). Jumlah beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp46 miliar dan Rp40 miliar.

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

11. ASET TAK BERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2017	449	7.222	75	607	8.353
Penambahan	-	1.289	3	21	1.313
Akuisisi	232	4	-	-	236
Pengurangan	(3)	(122)	-	(11)	(136)
Reklasifikasi/translasi	2	(6)	6	18	20
Saldo, 31 Desember 2017	<u>680</u>	<u>8.387</u>	<u>84</u>	<u>635</u>	<u>9.786</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2017	(29)	(4.776)	(56)	(403)	(5.264)
Beban amortisasi	-	(1.037)	(9)	(48)	(1.094)
Pengurangan	-	95	-	11	106
Reklasifikasi/translasi	-	4	(6)	(2)	(4)
Saldo, 31 Desember 2017	<u>(29)</u>	<u>(5.714)</u>	<u>(71)</u>	<u>(442)</u>	<u>(6.256)</u>
Nilai buku bersih	<u>651</u>	<u>2.673</u>	<u>13</u>	<u>193</u>	<u>3.530</u>

	<u>Goodwill</u>	<u>Piranti lunak</u>	<u>Lisensi</u>	<u>Aset takberwujud lainnya</u>	<u>Jumlah</u>
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2016	336	6.267	68	580	7.251
Penambahan	-	925	9	27	961
Pengurangan	-	-	(2)	-	(2)
Reklasifikasi/translasi	(4)	20	-	-	16
Akuisisi	117	10	-	-	127
Saldo, 31 Desember 2016	<u>449</u>	<u>7.222</u>	<u>75</u>	<u>607</u>	<u>8.353</u>
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2016	(29)	(3.748)	(49)	(369)	(4.195)
Beban amortisasi	-	(1.027)	(7)	(34)	(1.068)
Pengurangan	-	-	-	-	-
Reklasifikasi/translasi	-	(1)	-	-	(1)
Saldo, 31 Desember 2016	<u>(29)</u>	<u>(4.776)</u>	<u>(56)</u>	<u>(403)</u>	<u>(5.264)</u>
Niai buku bersih	<u>420</u>	<u>2.446</u>	<u>19</u>	<u>204</u>	<u>3.089</u>

(i) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), *data center* BDM (2012), Contact Centres Australia Pty.Ltd. (2014), MNDG (2015), Melon (2016), GSDm (2016), TSGN (2017), dan Nutech (2017) (Catatan 1d).

(ii) Beban amortisasi diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sisa periode amortisasi dari aset tak berwujud piranti lunak adalah 1-5 tahun.

(iii) Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp3.847 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA

	2017	2016
Pihak berelasi		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	574	1.223
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	322	324
Sub-jumlah	896	1.547
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang dan jasa	11.662	9.434
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.561	1.256
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	1.455	1.281
Sub-jumlah	14.678	11.971
Jumlah	15.574	13.518

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Rupiah	13.344	11.270
Dolar A.S.	2.167	2.196
Lain-lain	63	52
Jumlah	15.574	13.518

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2017	2016
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	7.093	6.165
Umum, administrasi dan pemasaran	2.684	1.914
Gaji dan tunjangan	2.664	2.993
Beban bunga dan administrasi bank	189	211
Jumlah	12.630	11.283

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

14. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

a. Pendapatan diterima di muka jangka pendek

	2017	2016
Kartu pulsa Prabayar	4.800	4.959
Sewa menara telekomunikasi	300	199
Jasa telekomunikasi lainnya	148	189
Lain-lain	179	216
Jumlah	5.427	5.563

b. Pendapatan diterima di muka jangka panjang

	2017	2016
Hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan	205	169
Jasa telekomunikasi lainnya	319	256
Jumlah	524	425

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Utang bank jangka pendek

Kreditur	Mata uang	2017		2016	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal	Setara Rupiah	Mata uang asal	Setara Rupiah
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	1.252	-	143
Bank Mandiri	Rp	-	45	-	-
Sub-jumlah		-	1.297	-	143
Pihak ketiga					
UOB	Rp	-	400	-	269
PT Bank DBS Indonesia	Rp	-	408	-	95
Bank CIMB Niaga	Rp	-	83	-	143
SCB	Rp	-	-	-	90
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("Sumitomo")	Rp	-	80	-	-
Lain-lain	Rp	-	21	-	171
Sub-jumlah			992		768
Jumlah			2.289		911

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Jatuh tempo fasilitas pinjaman	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun	Jaminan
BNI							
28 November 2012 ^{h,c}	Metra	Rp	150	28 November 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+2,95%	Tidak ada
13 Maret 2013 ^g	Sigma	Rp	2.100	9 Januari 2018	Bulanan	1 Bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
10 Januari 2014 ^f	Sigma	Rp	125	9 Januari 2018	Bulanan	1 Bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
15 Mei 2017	Infomedia	Rp	250	14 Mei 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
07 Juni 2017	ISH	Rp	150	6 Juni 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
19 Juni 2017	Telkominfra	Rp	161	31 Agustus 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
28 September 2017	Telkominfra	Rp	70	30 Juni 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
08 November 2017	GSD	Rp	50	8 November 2018	Bulanan	9,00%	Piutang usaha (Catatan 5)
19 Desember 2017	Telkominfra	Rp	80	31 Desember 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
Bank Mandiri							
11 Oktober 2017	GSD	Rp	55	11 September 2018	Bulanan	9%	Piutang usaha (Catatan 5)
UOB							
20 Desember 2016 ^d	Finnet	Rp	400	19 Desember 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+2,25%	Tidak ada
PT Bank DBS Indonesia							
12 April 2016 ^{e,b}	Sigma	US\$	0,02	31 Juli 2018	Semesteran	3,25% (US\$) / 10,75% (Rp)	Piutang usaha (Catatan 5)
27 Maret 2017	Metra	Rp	250	31 Juli 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga							
28 April 2013 ^{a,c}	GSD	Rp	85	1 Januari 2018	Bulanan	10,9%-11,5%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
Sumitomo							
21 Desember 2017	Metra	Rp	300	27 Januari 2018	Bulanan	1 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

Fasilitas utang bank yang diperoleh entitas anak digunakan untuk keperluan modal kerja.

^a Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 November 2014.

^b Fasilitas dalam mata uang Dolar A.S. Penarikan dapat dilakukan dalam mata uang Dolar A.S. dan Rupiah.

^c Perpanjangan otomatis bila belum dilunasi.

^d Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 2 Juni 2017.

^e Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 25 Oktober 2017.

^f Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 29 November 2017.

^g Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 21 Desember 2017.

^h Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 21 Maret 2017.

b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	2017	2016
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	206	225
Obligasi dan wesel bayar	16b	-	1
Utang bank	16c	4.110	3.637
Pinjaman lainnya	16d	99	-
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	794	658
Jumlah		5.209	4.521

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA

	Catatan	2017	2016
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	892	1.067
Obligasi dan wesel bayar	16b	8.982	9.322
Utang bank	16c	13.894	11.929
Pinjaman lainnya	16d	1.196	697
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	3.010	3.352
Jumlah		27.974	26.367

Jadwal pembayaran pokok utang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	Selanjutnya
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	16a	892	187	187	171	135	212
Obligasi dan wesel bayar	16b	8.982	-	1.995	-	2.196	4.791
Utang bank	16c	13.894	4.138	3.350	2.222	1.743	2.441
Pinjaman lainnya	16d	1.196	199	199	199	199	400
Utang sewa pembiayaan	9c.xiii	3.010	744	699	668	548	351
Jumlah		27.974	5.268	6.430	3.260	4.821	8.195

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

a. Pinjaman penerusan (*two-step loans*)

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam mata uang asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata uang	2017		2016	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	5.375	648	6.143	707
	US\$	17	237	22	295
	Rp	-	213	-	290
Jumlah			1.098		1.292
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			(206)		(225)
Bagian jangka panjang			892		1.067

Kreditur	Mata uang	Periode jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Bank luar negeri	Yen	Semesteran	Semesteran	2,95%
	US\$	Semesteran	Semesteran	3,85%
	Rp	Semesteran	Semesteran	8,25%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar

Obligasi dan wesel bayar	Mata uang	2017		2016	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi					
Tahun 2010					
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995
Tahun 2015					
Seri A	Rp	-	2.200	-	2.200
Seri B	Rp	-	2.100	-	2.100
Seri C	Rp	-	1.200	-	1.200
Seri D	Rp	-	1.500	-	1.500
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium Term Notes</i> atau "MTN")					
GSD					
Seri A	Rp	-	-	-	220
Seri B	Rp	-	-	-	120
Promes					
PT ZTE Indonesia ("ZTE")	US\$	-	-	0	1
Jumlah			8.995		9.336
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(13)		(13)
Jumlah			8.982		9.323
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			-		(1)
Bagian jangka panjang			8.982		9.322

i. Obligasi

Tahun 2010

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Sekuritas ("Bahana"), PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank CIMB Niaga.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan sistem satelit) dan optimasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

i. Obligasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 5:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Tahun 2015

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	2.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2022	Kuartalan	9,93%
Seri B	2.100	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2025	Kuartalan	10,25%
Seri C	1.200	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2030	Kuartalan	10,60%
Seri D	1.500	Perusahaan	BEI	23 Juni 2015	23 Juni 2045	Kuartalan	11,00%
Total	7.000						

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 9c.ix). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah Bank Permata.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 23 Juni 2015.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha: *Broadband, Backbone, Metro & RMJ* serta *IT App & Support* dan akuisisi beberapa perusahaan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Pada tanggal 31 Desember 2017, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan dipersyaratkan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 2:1.
2. *EBITDA* terhadap beban bunga tidak kurang dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

b. Obligasi dan wesel bayar (lanjutan)

ii. MTN

GSD

<u>Wesel bayar</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Pokok utang</u>	<u>Tanggal terbit</u>	<u>Jatuh tempo</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>
Seri A	Rp	220	14 November 2014	14 November 2019	Semesteran	11%
Seri B	Rp	120	6 Maret 2015	6 Maret 2020	Semesteran	11%
Total		340				

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) PT Graha Sarana Duta Tahun 2014 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 30 tanggal 13 November 2014 oleh Arry Supratno, S.H., GSD akan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Pada tanggal 12 Juni 2017, GSD melunasi MTN Seri A dengan nilai nominal Rp220 miliar dan Seri B dengan nilai nominal Rp120 miliar kepada PT Mandiri Sekuritas sebagai *Arranger/Pembeli Pertama*.

iii. Promes

<u>Pemasok</u>	<u>Mata Uang</u>	<u>Pokok utang* (dalam miliaran)</u>	<u>Tanggal perjanjian</u>	<u>Tanggal pembayaran</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga per tahun</u>
PT Huawei ^a	US\$	0,2	30 April 2013	-	Semesteran	6 bulan LIBOR+1,5%
ZTE ^{b,c}	US\$	0,1	20 Agustus 2009	4 Februari 2017	Semesteran	6 bulan LIBOR+1,5%

* Disajikan dalam mata uang asal

^a Telah dilakukan pelunasan pada tanggal 30 Juli 2016

^b Telah dilakukan pelunasan pada tanggal 4 Februari 2017

^c Berdasarkan amandemen terakhir tanggal 15 Agustus 2011

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan ZTE dan PT Huawei (*Agreement of Frame Supply and Deferred Payment Arrangement*), promes yang dikeluarkan Perusahaan kepada ZTE dan PT Huawei tersebut merupakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa jaminan untuk pembayaran 85% dari nilai berita acara serah terima proyek-proyek dengan ZTE dan PT Huawei.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank

Kreditur	Mata uang	2017		2016	
		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal	Setara Rupiah	Mata uang asal	Setara Rupiah
		(dalam jutaan)		(dalam jutaan)	
Pihak berelasi					
BNI	Rp	-	4.603	-	3.222
BRI	Rp	-	2.166	-	1.871
Bank Mandiri	Rp	-	1.126	-	1.232
Sub-jumlah			<u>7.895</u>		<u>6.325</u>
Pihak ketiga					
Sindikasi bank	Rp	-	2.250	-	3.650
The Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Ltd.	Rp	-	1.944	-	2.361
Bank CIMB Niaga	Rp	-	1.726	-	1.162
PT Bank Central Asia Tbk	Rp	-	1.100	-	-
Sumitomo	Rp	-	804	-	647
United Overseas Bank Limited ("UOB Singapore")	US\$	49	664	36	484
UOB	Rp	-	500	-	500
ANZ	Rp	-	440	-	240
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")	Rp	-	249	-	-
PT Bank DBS Indonesia	Rp	-	144	-	-
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US\$	9	128	16	211
Exim Bank of Malaysia Berhad	MYR	37	124	-	-
Lain-lain	Rp	-	26	-	37
	MYR	15	50	-	-
Sub-jumlah			<u>10.149</u>		<u>9.292</u>
Jumlah			<u>18.044</u>		<u>15.617</u>
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(40)		(51)
			<u>18.004</u>		<u>15.566</u>
Utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 15b)			(4.110)		(3.637)
Bagian jangka panjang			<u>13.894</u>		<u>11.929</u>

Informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

BNI	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas* (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
13 Maret 2013 ^h	Sigma	Rp	2.100	116	Bulanan (2016-2022)	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
20 November 2013 ^j	Perusahaan	Rp	1.500	375	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,00%	Tidak ada
10 Januari 2014 ^h	Sigma	Rp	247	41	Bulanan (2016-2022)	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas* (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
BNI (lanjutan)								
3 November 2014 ^c	Telkom Infratel	Rp	1.050	186	Kuartalan (2015-2019)	Bulanan	1 bulan JIBOR+3,35%	Piutang usaha (Catatan 5)
10 Juni 2015	Metra	Rp	44	15	Semesteran (2015-2018)	Bulanan	1 bulan JIBOR+2,95%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
12 Oktober 2015	Telkom Akses	Rp	1.400	350	Semesteran (2016-2019)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,90%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6), dan aset tetap (Catatan 9)
24 Maret 2017 ^{e&g}	Dayamitra	Rp	1.005	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Tidak ada
24 Maret 2017 ^e	GSD	Rp	150	-	Kuartalan (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Tidak ada
24 Maret 2017 ^e	Perusahaan	Rp	650	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Tidak ada
13 November 2017	Telkom Akses	Rp	400	-	Bulanan (2018-2021)	Bulanan	3 bulan JIBOR+2,50%	Piutang usaha (Catatan 5), persediaan (Catatan 6), dan aset tetap (Catatan 9)
BRI								
30 Oktober 2013	GSD	Rp	70	10	Bulanan (2014-2021)	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5), aset tetap (Catatan 9), dan kontrak sewa
30 Oktober 2013	GSD	Rp	34	5	Bulanan (2014-2021)	Bulanan	10,00%	Piutang usaha (Catatan 5), aset tetap (Catatan 9), dan kontrak sewa
20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	375	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,65%	Tidak ada
18 Desember 2015	Dayamitra	Rp	800	75	Semesteran (2017-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,70%	Aset tetap (Catatan 9)
24 Maret 2017 ^e	Perusahaan	Rp	500	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Tidak ada
24 Maret 2017 ^e	Dayamitra	Rp	500	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Tidak ada
20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	375	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,65%	Tidak ada
Bank Mandiri								
20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	375	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,65%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas* (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank Mandiri (lanjutan)								
27 September 2016	Patrakom	Rp	70	9	Kuartalan (2017-2019)	Bulanan	9,50%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
24 Maret 2017 ^e	Dayamitra	Rp	500	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Tidak ada
24 Maret 2017 ^e	TII	Rp	195	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,85%	Tidak ada
Sindikasi bank								
13 Maret 2015 (BNI dan BCA) ^{d,k}	Perusahaan	Rp	2.900	483	Semesteran (2016-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,00%	Seluruh aset
13 Maret 2015 (BNI dan BCA) ^{d,k}	GSD	Rp	100	17	Semesteran (2016-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,00%	Seluruh aset
The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.								
9 Oktober 2014	Dayamitra	Rp	600	160	Kuartalan (2016-2019)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,40%	Piutang usaha (catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
13 Maret 2015 ^d	Metra	Rp	400	68	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,5%	Tidak ada
13 Maret 2015 ^d	Infomedia	Rp	250	28	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,5%	Tidak ada
13 Maret 2015 ^d	Dayamitra	Rp	100	17	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
2 November 2015	Dayamitra	Rp	400	80	Kuartalan (2017-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,60%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
3 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	500	-	Semesteran (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,25%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
30 Maret 2017 ^f	Dayamitra	Rp	97,5	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
30 Maret 2017 ^f	GSD	Rp	202,5	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,5%	Tidak ada
30 Maret 2017 ^f	Metra	Rp	100	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,5%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga								
31 Maret 2011	GSD	Rp	24	3	Bulanan (2011-2020)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
31 Maret 2011	GSD	Rp	13	2	Bulanan (2011-2019)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
9 September 2011	GSD	Rp	41	4	Bulanan (2011-2021)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 9) dan kontrak sewa
20 September 2012 ⁱ	TLT	Rp	1.200	13	Bulanan (2015-2030)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +3,45%	Aset tetap (Catatan 9)
20 September 2012	TLT	Rp	118	1	Bulanan (2015-2030)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 9)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas* (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Bank CIMB Niaga (lanjutan)								
20 September 2012 ⁱ	TLT	Rp	100	1	Bulanan (2017-2030)	Bulanan	3 bulan JIBOR+3,45%	Aset tetap (Catatan 9)
30 Maret 2017	GSD	Rp	200	-	Kuartalan (2018-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
30 Maret 2017 ^f	Metra	Rp	295	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
BCA								
30 Maret 2017 ^f	Metra	Rp	170	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
5 Mei 2017 ^a	Telkomsel	Rp	3.000	-	Kuartalan (2017-2019)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,00%	Tidak ada
Sumitomo								
13 Maret 2015 ^d	Metra	Rp	400	68	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
13 Maret 2015 ^d	Infomedia	Rp	250	28	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
13 Maret 2015 ^d	Dayamitra	Rp	100	17	Kuartalan (2016-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,15%	Tidak ada
30 Maret 2017 ^f	Dayamitra	Rp	97,5	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
30 Maret 2017 ^f	GSD	Rp	202,5	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
30 Maret 2017 ^f	Metra	Rp	100	-	Kuartalan (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
UOB Singapore								
9 September 2016	TII	US\$	0,06	-	Semesteran (2019-2022)	Kuartalan	3 bulan LIBOR+1,50%	Tidak ada
UOB								
22 September 2016	Dayamitra	Rp	500	-	Semesteran (2018-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,20%	Aset tetap (Catatan 9)
ANZ								
13 Maret 2015 ^d	GSD	Rp	249,5	-	13 Juni 2020	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,00%	Tidak ada
13 Maret 2017 ^d	PINS	Rp	500	-	31 Mei 2022	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,00%	Tidak ada
ICBC								
5 April 2017	GSD	Rp	272	23	Kuartalan (2019-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,36%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
DBS								
23 Desember 2016	Nutech	Rp	6	1	Bulanan (2017-2021)	Bulanan	13,00%	Piutang usaha (Catatan 5) dan aset tetap (Catatan 9)
30 Maret 2017 ^f	Dayamitra	Rp	100	-	Semesteran (2018-2022)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+1,50%	Tidak ada
30 Maret 2017 ^f	Patrakom	Rp	130	-	Semesteran (2018-2022)	Kuartalan	7,50%	Tidak ada
JBIC								
28 Maret 2013 ^b	Perusahaan	US\$	0,03	0,006	Semesteran (2014-2019)	Semesteran	2.18% dan 6 bulan LIBOR+1,20%	Tidak ada
Exim Bank of Malaysia Berhad								
23 Maret 2016	TSGN	MYR	0,06	0,01	Bulanan (2016-2020)	Bulanan	ECOF+1,89%	Piutang usaha (Catatan 5)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. PINJAMAN JANGKA PANJANG DAN PINJAMAN LAINNYA (lanjutan)

c. Utang bank (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2017, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio keuangan tersebut, kecuali untuk pinjaman tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2017, Grup telah memperoleh persetujuan (*wavier*) dari pemberi pinjaman untuk tidak mensyaratkan pembayaran sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

* Disajikan dalam mata uang asal

- ^a Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Desember 2017, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.
- ^b Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, untuk pengadaan barang dan jasa dari konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom untuk proyek *Southeast Asia Japan Cable System*. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US\$18,8 juta dan US\$12,5 juta.
- ^c Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 30 Mei 2017.
- ^d Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra dan Infomedia menandatangani perjanjian kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., ANZ dan sindikasi bank (BCA dan BNI) masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar dan Rp3.000 miliar. Per 31 Desember 2017, fasilitas yang belum digunakan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. dan ANZ masing-masing sebesar Rp82,5 miliar, Rp82,5 miliar dan Rp60 miliar.
- ^e Pada tanggal 24 Maret 2017, Perusahaan, Dayamitra, Sigma, GSD, dan Telin menandatangani perjanjian kredit dari BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp1.000 miliar, Rp1.500 miliar, dan Rp1.500 miliar. Per 31 Desember 2017, fasilitas yang belum digunakan dari BNI dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp200 miliar, dan Rp805 miliar.
- ^f Pada tanggal 30 Maret 2017, Perusahaan, GSD, Metra, Dayamitra, PINS, dan Patrakom menandatangani perjanjian kredit dari The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan BCA, masing-masing sebesar Rp800 miliar, Rp800 miliar, Rp900 miliar, Rp495 miliar, dan Rp850 miliar. Per 31 Desember 2017, fasilitas yang belum digunakan dari The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan BCA masing-masing sebesar Rp529 miliar, Rp529 miliar, Rp759 miliar, Rp195 miliar dan Rp750 miliar.
- ^g Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 26 September 2017.
- ^h Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 21 Desember 2017.
- ⁱ Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 20 Oktober 2016.
- ^j Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 10 April 2017.
- ^k Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 9 Mei 2017.

d. Pinjaman lainnya

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
PT Sarana Multi Infrastruktur								
12 Oktober 2016	Dayamitra	Rp	700	-	Semesteran (2018-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,20%	Aset tetap (Catatan 9)
29 Maret 2017	Dayamitra	Rp	600	-	Semesteran (2018-2024)	Kuartalan	3 bulan JIBOR+2,20%	Aset tetap (Catatan 9)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Dayamitra diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to equity* tidak lebih dari 5:1.
2. *Net debt* terhadap *EBITDA* tidak lebih dari 4:1.
3. *Debt service coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Dayamitra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	2017	2016
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:		
Telkomsel	18.944	20.778
GSD	186	141
Metra	115	208
TII	172	33
Jumlah	19.417	21.160
	2017	2016
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) tahun berjalan entitas anak:		
Telkomsel	10.637	9.867
Metra	(82)	(39)
TII	6	(3)
GSD	(5)	(5)
Jumlah	10.556	9.820

Entitas anak dengan kepemilikan nonpengendali yang material

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kepemilikan kepentingan nonpengendali yang dianggap material oleh Perusahaan adalah kepemilikan kepentingan nonpengendali atas Telkomsel sebesar 35% (Catatan 1d).

Ringkasan informasi keuangan Telkomsel dibawah ini disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan

	2017	2016
Aset lancar	21.098	28.818
Aset tidak lancar	64.650	60.963
Liabilitas jangka pendek	(23.031)	(21.891)
Liabilitas jangka panjang	(8.587)	(8.520)
Jumlah ekuitas	54.130	59.370
Yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	35.186	38.592
Kepentingan nonpengendali	18.944	20.778

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	2017	2016
Pendapatan	93.217	86.725
Beban operasi	(53.183)	(49.751)
Pendapatan lain-lain - bersih	380	483
Laba sebelum pajak penghasilan	40.414	37.457
Beban pajak penghasilan - bersih	(10.018)	(9.263)
Laba tahun berjalan dari operasi yang masih berlanjut	30.396	28.194
Penghasilan komprehensif lain - bersih	(392)	(222)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	30.004	27.972
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada		
kepentingan nonpengendali	10.637	9.867
Dividen yang dibayar kepada kepentingan nonpengendali	12.334	7.036

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Ringkasan laporan arus kas

	2017	2016
Kegiatan operasi	39.564	42.827
Kegiatan investasi	(13.984)	(12.794)
Kegiatan pendanaan	(34.720)	(24.132)
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan setara kas	(9.140)	5.901

18. MODAL SAHAM

Keterangan	2017		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.560	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	6.078.374.280	6,14	304
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	414.157	0	0
Hadiyanto	875.297	0	0
Rinaldi Firmansyah	147.100	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	920.349	0	0
Herdy Rosadi Harman	828.012	0	0
Abdus Somad Arief	828.314	0	0
Dian Rachmawan	888.854	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	41.376.586.676	41,77	2.069
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	1.737.779.800	0	87
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040

Keterangan	2016		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,09	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	7.000.589.980	7,07	350
Komisaris (Catatan 1b):			
Hendri Saparini	414.157	0	0
Dolfie Othniel Fredric Palit	372.741	0	0
Hadiyanto	875.297	0	0
Direksi (Catatan 1b):			
Alex Janangkih Sinaga	920.349	0	0
Indra Utoyo	1.972.644	0	0
Honesti Basyir	1.945.644	0	0
Herdy Rosadi Harman	828.012	0	0
Abdus Somad Arief	828.314	0	0
Dian Rachmawan	888.854	0	0
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	40.450.227.048	40,84	2.023
Jumlah	99.062.216.600	100,00	4.953
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 20)	1.737.779.800	0	87
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2017	2016
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446
Selisih lebih harga penjualan kembali 215.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap II atas biaya perolehannya (Catatan 20)	576	576
Selisih lebih harga penjualan kembali 211.290.500 saham yang diperoleh kembali pada tahap I atas biaya perolehannya (Catatan 20)	544	544
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	478	478
Selisih lebih harga pengalihan saham yang diperoleh kembali untuk program kepemilikan saham karyawan atas biaya perolehannya (Catatan 20)	228	228
Selisih lebih harga penjualan kembali 22.363.000 sisa saham yang diperoleh kembali pada tahap III atas biaya perolehannya (Catatan 20)	36	36
Selisih lebih harga penjualan kembali 864.000.000 saham yang diperoleh kembali pada tahap IV atas biaya perolehannya (Catatan 20)	1.996	1.996
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)
Jumlah bersih	4.931	4.931

Saldo selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendalian berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp537 miliar.

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Tahap	Dasar	Jangka waktu	Maksimum pembelian	
			Lembar	Nilai
I	RUPSLB	21 Desember 2005 - 20 Juni 2007	1.007.999.964	Rp5.250
II	RUPST	29 Juni 2007 - 28 Desember 2008	215.000.000	Rp2.000
III	RUPST	20 Juni 2008 - 20 Desember 2009	339.443.313	Rp3.000
-	BAPEPAM - LK	13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	4.031.999.856	Rp3.000
IV	RUPST	19 Mei 2011 - 20 November 2012	645.161.290	Rp5.000

Mutasi modal saham yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

	2017			2016		
	Jumlah saham	%	Rp	Jumlah saham	%	Rp
Saldo awal	1.737.779.800	1,72	2.541	2.601.779.800	2,58	3.804
Penjualan atas saham yang diperoleh kembali	-	-	-	(864.000.000)	(0,86)	(1.263)
Saldo akhir	1.737.779.800	1,72	2.541	1.737.779.800	1,72	2.541

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pelaksanaan pembelian kembali modal saham tahap IV.

Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan pembelian kembali sejumlah 237.270.500 saham (setara dengan 1.186.352.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang beredar di publik (sebagai bagian dari proses program pembelian kembali saham tahap IV) sebesar Rp1.744 miliar.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali tahap III untuk digunakan sebagai pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan atau Employee Stock Ownership Program ("ESOP") tahun 2013.

Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 211.290.500 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.056.452.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap I yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.368 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih atas nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp544 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 215.000.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.075.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap II yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.541 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp576 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 21 Desember 2015, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 4.472.600 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 22.363.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan sisa saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap III yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp68 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp36 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

Pada tanggal 29 Juni 2016, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 172.800.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 864.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali sebagian dari program pembelian kembali saham tahap IV yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp3.259 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp1.996 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 19).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	2017	2016
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	58	38
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	527	503
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(637)	(637)
Komponen ekuitas lainnya	53	49
Jumlah	387	339

22. PENDAPATAN

	2017	2016
Pendapatan telepon		
Selular		
Pendapatan pemakaian	37.176	38.238
Pendapatan abonemen bulanan	70	259
	<u>37.246</u>	<u>38.497</u>
Tidak bergerak		
Pendapatan abonemen bulanan	3.260	3.311
Pendapatan pemakaian	3.032	3.847
<i>Call center</i>	290	290
Lain-lain	83	94
	<u>6.665</u>	<u>7.542</u>
Jumlah pendapatan telepon	43.911	46.039
Pendapatan interkoneksi	5.175	4.151
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika		
Internet dan data selular	37.961	28.308
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	15.085	13.073
<i>Short Messaging Services</i> ("SMS")	13.192	15.980
TV berbayar	1.944	1.546
Lain-lain	353	64
Jumlah pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	68.535	58.971
Pendapatan jaringan	1.873	1.444
Pendapatan lainnya		
Penjualan periferal	2.292	1.490
<i>Call center service</i>	970	678
Sewa menara telekomunikasi	796	733
<i>Power supply</i>	560	29
CPE dan terminal	536	192
<i>E-payment</i>	505	424
<i>E-health</i>	470	415
Lain-lain	2.633	1.767
Jumlah pendapatan lainnya	8.762	5.728
Jumlah pendapatan	128.256	116.333

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Grup dari transaksi keagenan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pendapatan bruto	39.111	29.319
Kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah	(1.150)	(1.011)
Pendapatan neto	<u>37.961</u>	<u>28.308</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

23. BEBAN KARYAWAN

Rincian dari beban karyawan adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gaji dan tunjangan	7.821	7.476
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	3.339	3.865
Beban pensiun (Catatan 29)	1.700	1.068
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 29)	276	163
Beban penghargaan masa kerja (Catatan 30)	255	237
Beban manfaat karyawan lainnya (Catatan 29)	62	82
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 29)	42	48
Program pensiun dini	-	628
Lain-lain	34	45
Jumlah	<u>13.529</u>	<u>13.612</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

24. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Rincian dari beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Operasi dan pemeliharaan	19.929	17.047
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 34c.i)	4.276	3.687
Beban pokok jasa teknologi informatika	2.648	1.563
Sewa sirkit dan CPE	2.607	2.578
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	2.249	2.217
Beban pokok penjualan <i>handset</i> (Catatan 6)	1.544	1.481
Listrik, gas, dan air	1.037	960
Beban pokok penjualan kartu SIM dan vaucer (Catatan 6)	914	624
Sewa menara	472	322
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	301	367
Asuransi	294	256
Lain-lain	332	161
Jumlah	<u>36.603</u>	<u>31.263</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Provisi penurunan nilai piutang (Catatan 5d)	1.494	743
Beban umum	1.449	1.626
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	531	399
Jasa profesional	498	594
Perjalanan	475	436
Rapat	241	207
Sumbangan sosial	197	134
Beban penagihan	135	152
Lain-lain	240	319
Jumlah	<u>5.260</u>	<u>4.610</u>

Lihat Catatan 31 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

26. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perusahaan		
PPH Badan	610	473
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	1.338	335
Entitas anak		
PPH Badan	174	66
PPN	1.871	1.146
Total tagihan restitusi pajak	3.993	2.020
Bagian jangka pendek	(908)	(592)
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	<u>3.085</u>	<u>1.428</u>

b. Pajak dibayar di muka

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perusahaan		
PPH Pasal 19 - Penilaian kembali aset tetap (Catatan 26f)	-	538
Pasal 22 - Pembelian barang	1	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	44	-
PPN	629	1.075
Entitas anak		
PPH Badan	1	62
PPH		
Pasal 23 - Penyerahan jasa	17	52
PPN	2.008	1.639
Total pajak dibayar di muka	2.700	3.366
Bagian jangka pendek	(1.947)	(2.138)
Bagian jangka panjang (Catatan 10)	<u>753</u>	<u>1.228</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perusahaan		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	26	29
Pasal 21 - PPh pribadi	81	141
Pasal 22 - Pembelian barang	3	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	29	42
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	1	-
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	1	136
PPN		
PPN WAPU	372	297
	<u>513</u>	<u>647</u>
Entitas anak		
PPH		
Pasal 4 (2) - Pajak final	85	63
Pasal 21 - PPh pribadi	129	121
Pasal 22 - Pembelian barang	3	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	115	93
Pasal 25 - Angsuran PPh Badan	37	136
Pasal 26 - PPh Wajib Pajak Luar Negeri	303	16
Pasal 29 - PPh Badan	763	1.100
PPN	842	776
	<u>2.277</u>	<u>2.307</u>
Jumlah utang pajak	<u>2.790</u>	<u>2.954</u>

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kini		
Perusahaan	586	671
Entitas anak	10.771	10.067
	<u>11.357</u>	<u>10.738</u>
Tangguhan		
Perusahaan	(1.603)	(844)
Entitas anak	204	(877)
	<u>(1.399)</u>	<u>(1.721)</u>
Beban pajak penghasilan bersih	<u>9.958</u>	<u>9.017</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 20% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum pajak penghasilan	42.659	38.189
Dikurangi pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih	(1.491)	(1.684)
	<u>41.168</u>	<u>36.505</u>
Pajak dihitung pada tarif Perusahaan 20%	8.234	7.301
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	2.046	1.904
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	761	491
Pajak penghasilan final	591	345
Pembalikan aset pajak tangguhan	(6)	56
Aset pajak tangguhan atas penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan	(1.796)	(1.415)
Lain-lain	128	335
Beban pajak penghasilan bersih	<u>9.958</u>	<u>9.017</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum pajak penghasilan	42.659	38.189
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	21.445	24.613
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	64.104	62.802
Dikurangi: laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(43.702)	(40.166)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	20.402	22.636
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(462)	(670)
	<u>19.940</u>	<u>21.966</u>
Perbedaan temporer:		
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan penghapusbukuan piutang	1.030	(43)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	985	513
Penyisihan beban karyawan	188	560
Pengukuran nilai wajar opsi jual dan investasi jangka panjang	-	172
Provisi terminasi atas kontrak yang memberatkan	-	(547)
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(3.120)	(1.880)
Realisasi provisi penurunan nilai aset	(1.012)	(1.186)
Pendapatan instalasi tangguhan	(4)	50
Sewa pembiayaan	(3)	(337)
Penyisihan lain-lain	(76)	(106)
Jumlah perbedaan temporer bersih	<u>(2.012)</u>	<u>(2.804)</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2017	2016
Perbedaan tetap:		
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala - bersih	276	163
Manfaat kerja tidak dapat dibebankan	264	302
Sumbangan	194	162
Keuntungan pengalihan bisnis ke entitas sepengendali	86	-
Penghapusbukuan piutang	-	590
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(20.635)	(19.445)
Lain-lain	1.026	769
Jumlah perbedaan tetap bersih	(18.789)	(17.459)
(Rugi) laba kena pajak	(861)	1.703
Beban pajak kini	-	340
Beban pajak final	586	331
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	586	671
Beban pajak kini - entitas anak	10.771	10.067
Jumlah beban pajak penghasilan kini	11.357	10.738

Dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah ("PP") No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5% dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perusahaan akan menyampaikan perhitungan PPh Badan di atas dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2017 kepada kantor pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jumlah PPh Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Pada tanggal 15 November 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk PPN masa pajak Januari sampai dengan September dan November 2007 senilai Rp142 miliar. Pada tanggal 20 Januari 2014 Perusahaan mengajukan keberatan, dan di bulan Desember 2014, Otoritas Pajak menerbitkan keputusan penolakan keberatan. Perusahaan menerima hasil pemeriksaan kurang bayar PPN senilai Rp22 miliar (termasuk denda Rp10 miliar) dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp120 miliar (termasuk denda Rp39 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 12 Maret 2015, Perusahaan telah mengajukan banding.

Pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas proses banding PPN Interkoneksi tersebut, dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga masuk kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan banding Perusahaan. Pada bulan September 2017, Perusahaan menerima restitusi senilai Rp115 miliar dan saldo tersisa senilai Rp5 miliar telah dikompensasikan sebagai pembayaran STP PPh 21.

Pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 23 November 2017, Perusahaan menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali. Pada tanggal 23 November 2017 dan 21 Desember 2017, Perusahaan telah mengirimkan jawaban tentang kontra memori peninjauan kembali atas perkara PPN Interkoneksi ini, dan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses peninjauan kembali masih dalam proses.

Pada bulan November 2014, Perusahaan menerima SKPKB untuk tahun fiskal 2011 dari Otoritas Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan menerima ketetapan kurang bayar PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan ketetapan kurang bayar pajak penghasilan badan senilai Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Bagian yang telah diterima senilai Rp4,7 miliar (termasuk denda sebesar Rp2 miliar) telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2014. Sedangkan atas PPN Interkoneksi senilai Rp178 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak dan pada tanggal 7 Januari 2015, Perusahaan telah mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2015, Otoritas Pajak telah menerbitkan putusan penolakan keberatan. Sebagai tanggapan atas putusan keberatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2016, Perusahaan mengajukan banding.

Pada tanggal 4 dan 5 April 2017, Pengadilan Pajak menerbitkan putusan atas banding tersebut diatas, dan dalam putusannya, dinyatakan bahwa Interkoneksi *International Incoming Call* adalah penyerahan jasa kena pajak di luar daerah pabean sehingga masuk kategori ekspor jasa kena pajak dan terutang PPN sebesar 0% dan mengabulkan seluruh permohonan Perusahaan untuk masa pajak Januari dan September s.d. Desember 2011. Sedangkan untuk masa pajak Februari s.d. Agustus 2011 tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal, untuk itu pada tanggal 19 dan 21 Juni 2017, Perusahaan telah mengajukan memori peninjauan kembali. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, memori peninjauan kembali masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 3 Mei 2016, Otoritas Pajak menerbitkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari sampai dengan Desember 2012, dan atas pemeriksaan tersebut telah menerbitkan SKPKB PPh Badan senilai Rp991,6 miliar (termasuk denda Rp321,6 miliar), SKPKB PPN senilai Rp467 miliar (termasuk denda Rp153,5 miliar), SKPKB PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak ("JKP") dari Luar Daerah Pabean senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta), SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp57 miliar (termasuk denda Rp18,5 miliar), tagihan pajak PPN senilai Rp37,5 miliar, SKPKB PPh pasal 21 senilai Rp16,2 miliar (termasuk denda Rp5,3 miliar), SKPKB PPh Final pasal 21 senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp407 juta), SKPKB PPh pasal 23 senilai Rp63,5 miliar (termasuk denda Rp20,6 miliar), SKPKB PPh pasal 4 (2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar) dan SKPKB PPh pasal 26 senilai Rp 197,6 miliar (termasuk denda Rp 64 miliar). Perusahaan telah menyetujui senilai Rp35 miliar terkait Perhitungan Kembali Pengkreditan Pajak Masukan atas Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi *international incoming call*, Rp613 juta atas Pajak Penghasilan, dan Rp311,5 juta atas PPh pasal 26 dan telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2016. Atas bagian lainnya, pada tanggal 16 November 2016 Perusahaan telah mengajukan keberatan.

Pada tanggal tanggal 1 Maret 2017 dan 9 Mei 2017, Perusahaan menerima Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak atas kurang bayar PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp1,8 juta (termasuk denda Rp 0,6 juta) dan kurang bayar PPN atas pemungutan pajak senilai Rp 4,4 miliar (termasuk denda Rp1,4 miliar), dan Perusahaan memutuskan untuk menerima keputusan tersebut.

Pada tanggal 19 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk PPh *Withholding* dan PPh Badan dengan rincian kurang bayar Pajak PPh Pasal 21 senilai Rp20,7 miliar (termasuk denda Rp6,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 21 Final senilai Rp23,8 miliar (termasuk denda Rp7,7 miliar), kurang bayar PPh Pasal 23 senilai Rp115,7 miliar (termasuk denda Rp37,5 miliar), kurang bayar PPh Pasal 4(2) senilai Rp25 miliar (termasuk denda Rp8,1 miliar), kurang bayar PPh Pasal 26 senilai Rp197,6 miliar (termasuk denda Rp64,1 miliar) dan kurang bayar PPh Badan senilai Rp496,4 miliar (termasuk denda Rp 161 miliar). Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk PPN Masa Januari s.d. Desember 2012 dengan total Rp429,3 miliar (termasuk denda Rp141,2 miliar). Atas keputusan keberatan tersebut, pada tanggal 17 dan 26 Januari 2018, Perusahaan mengajukan banding. Sampai dengan penerbitan laporan konsolidasian ini, proses banding masih dalam proses.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Otoritas Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2015 atas lebih bayar pajak PPh Badan senilai Rp414 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 25 April 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPh Badan senilai Rp147 miliar, SKPKB PPN Dalam Negeri senilai Rp13 miliar (termasuk denda Rp4 miliar), SKPKB PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp6 miliar (termasuk denda Rp1,5 miliar), dan SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar (termasuk denda Rp17 miliar). Beserta tagihan pajak PPN Dalam Negeri senilai Rp34 miliar, tagihan pajak PPN atas Pemungutan Pajak senilai Rp7 miliar dan tagihan pajak PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp8 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan setuju untuk menerima putusan pemeriksaan sebesar Rp17 miliar atas PPh Badan, mengalihkan perhitungan pajak atas realisasi ganti rugi migrasi Flexi senilai Rp42 miliar kedalam SPT PPh Badan tahun 2016, dan SKPKB serta STP PPN sebesar Rp26 miliar. Atas ketetapan pajak yang telah disetujui telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif.

Pada tanggal 24 Juli 2017, Perusahaan mengajukan Surat Keberatan kepada Otoritas Pajak untuk SKPLB PPh Badan dengan keberatan senilai Rp210,5 miliar dan PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean senilai Rp55 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses keberatan masih berlangsung.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa pajak Januari s.d. Desember 2016 untuk seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini berkenaan dengan klaim restitusi Lebih Bayar SPT PPh Badan tahun pajak 2016. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses pemeriksaan masih berlangsung.

Pada tanggal 11 September 2017 dan 9 Januari 2018, Otoritas Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan masa Pajak Desember 2014 untuk jenis pajak PPN berkenaan dengan klaim restitusi Lebih Bayar Pembetulan SPT PPN masa pajak Desember 2014 dan masa pajak November 2014, masing-masing sebesar Rp129 miliar dan Rp86,7 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses pemeriksaan masih berlangsung.

(ii) Telkomsel

Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak telah menerima banding Telkomsel atas PPN dan *withholding tax* tahun 2006 dengan total Rp116 miliar. Pada bulan Februari 2014, Telkomsel menerima pengembalian pajak. Pada tanggal 3 Juli 2015, dalam hal menanggapi surat Telkomsel untuk klaim pendapatan bunga atas putusan PPN dan Pemotongan Pajak yang menguntungkan tahun 2006, Otoritas pajak menginformasikan bahwa klaim tersebut tidak bisa dijamin sampai Otoritas Pajak mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Agustus 2016 Telkomsel menerima pemberitahuan dari Pengadilan Pajak bahwa Otoritas Pajak mengajukan uji materi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas PPN sebesar Rp108 miliar. Kontra memorandum untuk pengujian uji materi telah dikirim pada tanggal 14 September 2016. Pada bulan April 2017, Otoritas Pajak telah menjamin klaim Telkomsel atas pendapatan bunga yang akan dikompensasikan ke pembayaran cicilan PPh Badan untuk periode April 2017. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan uji materi masih dalam proses.

Pada tanggal 21 April 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Pajak yang menerima permintaan Telkomsel untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8,4 miliar). Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima surat keputusan tersebut dari Mahkamah Agung dan telah dibayarkan ke kas negara di bulan Juni 2017.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(iii) Telkomsel (lanjutan)

Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2010 senilai Rp15,7 miliar berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada bulan Juli 2016, Telkomsel mengakui denda pajak senilai Rp15,7 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, kontra memori peninjauan kembali masih dalam proses.

Pada tanggal 24 Mei 2012, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) untuk tahun 2010 dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 9 Mei 2017, Telkomsel menerima keputusan dari Mahkamah Agung yang menolak banding Telkomsel, sehingga atas kurang bayar PPN tersebut telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Juli 2017. Pada tanggal 19 Juli 2017, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali tahap kedua atas keputusan Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses memori peninjauan kembali masih berlangsung.

Pada tanggal 15 Februari 2016, Telkomsel mengajukan banding kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan senilai Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar). Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2016, Telkomsel juga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas kurang bayar PPN senilai Rp1,2 miliar (termasuk denda Rp392 juta). Pada tanggal 6 Februari 2017, Telkomsel menerima keputusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan pengajuan banding Telkomsel atas PPN senilai Rp1,2 miliar. Di bulan Maret dan Juni 2017, Telkomsel menerima pengembalian pajak. Pada tanggal 2 Maret 2017, Telkomsel menerima keputusan Pengadilan Pajak atas PPh Badan, dimana pengajuan banding senilai Rp247,6 miliar dikabulkan, dan pada tanggal 31 Agustus 2017 Telkomsel telah menerima restitusi tersebut.

Di bulan Juli dan Oktober 2017, Telkomsel menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Otoritas Pajak mengajukan memori peninjauan kembali atas kurang bayar PPh Badan dan PPN masing-masing senilai Rp62 miliar dan Rp1,2 miliar. Atas hal ini, Telkomsel mengajukan kontra memori peninjauan kembali di bulan Agustus dan November 2017. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, proses kontra memori peninjauan kembali masih berlangsung.

Pada tanggal 28 Juli 2016 dan di bulan April 2017, Telkomsel telah menerima surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan pajak masing-masing untuk tahun fiskal 2014 dan 2015. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Insentif pajak

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan memanfaatkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V dalam bentuk insentif pajak untuk penilaian kembali aset tetap sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 191/PMK.010/2015 jo PMK No. 233/PMK.03/2015 jo PMK No.29/PMK.03/2016. Sesuai dengan PMK tersebut, Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dalam jangka waktu sejak berlakunya PMK tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Perlakuan khusus tersebut berupa PPh yang bersifat final berkisar 3%-6% atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Pada tanggal 29 Desember 2015, Perusahaan telah mengajukan permohonan penilaian kembali aset tetap berdasarkan hasil perkiraan penilaian kembali sendiri dan telah melunasi PPh Final terkait sebesar Rp750 miliar. Sesuai PMK, nilai aset tetap hasil perkiraan penilaian kembali sendiri harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Setelah meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan, DJP dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aset tetap. Perusahaan telah menunjuk KJPP untuk melakukan penilaian kembali aset tetap Perusahaan.

Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan Dokumen Penilaian Kembali Aset Tetap tahap 1 beserta Laporan Penilaian Kembali Aset Tetap dari KJPP yang meliputi bangunan dan alat produksi *indoor* ke DJP pada tanggal 29 September 2016. Pada tanggal 10 November 2016, DJP telah mengeluarkan persetujuan atas Penilaian Kembali Aset Tetap senilai Rp7.078 miliar dengan PPh Final sebesar Rp212 miliar.

Pada tanggal 15 Desember 2016, Perusahaan menyampaikan kembali permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2016 yang meliputi aset alat produksi *outdoor* dengan estimasi kenaikan nilai aset sebesar Rp8.960 miliar dan PPh Final sebesar Rp538 miliar. Perusahaan telah menerima laporan hasil penilaian kembali aset dari KJPP dan terdapat kenaikan nilai aset tetap sebesar Rp8.982 miliar, sehingga nilai PPh Final yang timbul adalah sebesar Rp540 miliar. Atas kenaikan PPh Final tersebut, Perusahaan telah melunasi kekurangan PPh Final sebesar Rp2 miliar pada tanggal 22 September 2017 dan 15 November 2016. Pada tanggal 21 November 2017, DJP telah mengeluarkan persetujuan atas Penilaian Kembali Aset Tetap senilai Rp8.982 miliar dengan PPh Final sebesar Rp540 miliar.

Penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan ini menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, karena dasar pengenaan pajak atas aset tetap menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat secara akuntansi. Perbedaan temporer tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan karena manfaat ekonomik akan mengalir ke Perusahaan dalam bentuk pengurangan laba kena pajak di masa depan ketika jumlah tercatat aset tersebut terpulihkan.

Pada tahun 2016, Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp1.415 miliar atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali yang telah disetujui oleh DJP di atas nilai sisa buku fiskal semula. Atas persetujuan yang dikeluarkan DJP di tahun 2017, Perusahaan kembali mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp1.796 miliar atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali yang telah disetujui oleh DJP di atas nilai buku fiskal semula.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) dikreditkan ke ekuitas dan reklasifikasi	31 Desember 2017
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	563	197	342	-	1.102
Provisi penurunan nilai piutang	388	206	-	-	594
Penyisihan beban karyawan	209	38	-	-	247
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(772)	1.012	-	-	240
Rugi fiskal	-	172	-	-	172
Pendapatan instalasi tangguhan	75	(1)	-	-	74
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	69	(26)	-	-	43
Sewa pembiayaan	1	(0)	-	-	1
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>533</u>	<u>1.598</u>	<u>342</u>	<u>-</u>	<u>2.473</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Penilaian investasi jangka panjang	(11)	-	-	-	(11)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(11)	10	-	-	(1)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(22)</u>	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>511</u>	<u>1.608</u>	<u>342</u>	<u>-</u>	<u>2.461</u>
Aset pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>258</u>	<u>(20)</u>	<u>9</u>	<u>96</u>	<u>343</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Penyisihan imbalan karyawan	478	68	131	-	677
Provisi penurunan nilai piutang	143	41	-	-	184
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>621</u>	<u>109</u>	<u>131</u>	<u>-</u>	<u>861</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(549)	(12)	-	-	(561)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(482)	55	-	(125)	(552)
Aset takberwujud	(48)	(177)	-	-	(225)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.079)</u>	<u>(134)</u>	<u>-</u>	<u>(125)</u>	<u>(1.338)</u>
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	<u>(458)</u>	<u>(25)</u>	<u>131</u>	<u>(125)</u>	<u>(477)</u>
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	<u>(287)</u>	<u>(164)</u>	<u>12</u>	<u>(17)</u>	<u>(456)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(745)</u>	<u>(189)</u>	<u>143</u>	<u>(142)</u>	<u>(933)</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>769</u>	<u>1.588</u>	<u>351</u>	<u>96</u>	<u>2.804</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2015	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan komprehensif lain konsolidasian	(Dibebankan) dikreditkan dan reklasifikasi	31 Desember 2016
Perusahaan					
Aset pajak tangguhan:					
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	335	102	126	-	563
Provisi penurunan nilai piutang	429	(41)	-	-	388
Penyisihan beban karyawan	97	112	-	-	209
Pendapatan instalasi tangguhan	65	10	-	-	75
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	211	(142)	-	-	69
Sewa pembiayaan	69	(68)	-	-	1
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>1.206</u>	<u>(27)</u>	<u>126</u>	<u>-</u>	<u>1.305</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.597)	825	-	-	(772)
Penilaian investasi jangka panjang	(45)	34	-	-	(11)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(23)	12	-	-	(11)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.665)</u>	<u>871</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(794)</u>
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u>(459)</u>	<u>844</u>	<u>126</u>	<u>-</u>	<u>511</u>
Aset pajak tangguhan - entitas anak lainnya - bersih	<u>201</u>	<u>50</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>258</u>
Telkomsel					
Aset pajak tangguhan:					
Penyisihan imbalan karyawan	349	55	74	-	478
Provisi penurunan nilai piutang	138	5	-	-	143
Jumlah aset pajak tangguhan	<u>487</u>	<u>60</u>	<u>74</u>	<u>-</u>	<u>621</u>
Liabilitas pajak tangguhan:					
Sewa pembiayaan	(385)	(164)	-	-	(549)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.395)	913	-	-	(482)
Aset takberwujud	(52)	4	-	-	(48)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	<u>(1.832)</u>	<u>753</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.079)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - Telkomsel -bersih	<u>(1.345)</u>	<u>813</u>	<u>74</u>	<u>-</u>	<u>(458)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - entitas anak lainnya - bersih	<u>(306)</u>	<u>14</u>	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>(287)</u>
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(2.110)</u>	<u>1.286</u>	<u>79</u>	<u>-</u>	<u>(745)</u>
Aset pajak tangguhan - bersih	<u>201</u>	<u>435</u>	<u>129</u>	<u>4</u>	<u>769</u>

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp31.928 miliar dan Rp34.568 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba fiskal di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

h. Administrasi

Sejak tahun 2008 s.d. 2016, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan PP No. 81 tahun 2007 sebagaimana telah diubah PP No. 77 tahun 2013 dan diubah terakhir dengan PP No. 56 tahun 2015, serta PMK No. 238/PMK.03/2008. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi (lanjutan)

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh PMK No. 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebagaimana telah diubah terakhir oleh PMK No.16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM serta PPh 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

27. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp22.145 miliar dan Rp19.352 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 99.062.216.600 dan 98.638.501.532 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Jumlah rata-rata tertimbang juga memperhitungkan rata-rata tertimbang atas dampak transaksi modal saham yang diperoleh kembali dalam perubahan transaksi pembelian saham kembali selama tahun berjalan.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp223,55 dan Rp196,19 (dalam jumlah penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

28. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 50 tertanggal 22 April 2016, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk 2015 masing-masing sebesar Rp7.744 miliar (Rp78,86 per lembar saham) dan Rp1.549 miliar (Rp15,77 per lembar saham). Pada tanggal 26 Mei 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas dan spesial dividen kas sebesar Rp9.293 miliar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 28 tertanggal 21 April 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk tahun buku 2016 masing-masing sebesar Rp11.611 miliar (Rp117,21 per lembar saham) dan Rp1.935 miliar (Rp19,54 per lembar saham).

Pada tanggal 27 Desember 2016, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen interim sebesar Rp1.920 miliar atau sebesar Rp19,38 lembar per saham.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban manfaat pensiun dibayar dimuka			
Perusahaan - <i>funded</i>		-	197
MDM		-	1
Infomedia		-	1
		<u>-</u>	<u>199</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	1.540	-
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	1.076	-
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	2.384	2.507
Telkomsel	29a.ii	1.839	1.193
Patrakom		0	0
MDM		0	0
Infomedia		0	0
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun		<u>6.839</u>	<u>3.700</u>
Imbalan kesehatan pasca kerja	29b	2.419	1.592
Imbalan pasca kerja lainnya	29c	510	502
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	29d	<u>427</u>	<u>332</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya		<u>10.195</u>	<u>6.126</u>

Beban manfaat yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban pensiun			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	557	608
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	657	-
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	239	279
Telkomsel	29a.ii	247	181
MDM		0	0
Infomedia		0	0
Patrakom		0	0
Beban pensiun	23	<u>1.700</u>	<u>1.068</u>
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	23,29b	276	163
Beban imbalan pasca kerja lainnya	23,29c	42	48
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	23,29d	<u>62</u>	<u>82</u>
Jumlah		<u>2.080</u>	<u>1.361</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

Beban manfaat yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Catatan	2017	2016
Laba (rugi) aktuarial program manfaat pasti			
Perusahaan - <i>funded</i>	29a.i.a		
Manfaat pasti	29a.i.a.i	(1.154)	(492)
Manfaat tambahan	29a.i.a.ii	(419)	-
Perusahaan - <i>unfunded</i>	29a.i.b	(100)	(119)
Telkomsel	29a.ii	(530)	(292)
Infomedia		(1)	0
Patrakom		0	0
MDM		(2)	(1)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja	29b	(551)	(1.309)
Beban imbalan pasca kerja lainnya	29c	(40)	(20)
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	29d	(72)	(33)
Sub-Jumlah		(2.869)	(2.266)
Pajak tangguhan dengan tarif pajak yang berlaku	26g	494	208
Rugi aktuarial program manfaat pasti - bersih		(2.375)	(2.058)

a. Beban manfaat pensiun

i. Perusahaan

a. *Funded*

i. Manfaat pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini diatur didalam undang-undang pensiun Indonesia dan dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke dana pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 untuk program pensiun manfaat pasti:

	2017	2016
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	18.849	16.505
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	366	363
Beban jasa lalu - perubahan program	94	245
Beban bunga	1.454	1.444
Kontribusi peserta program pensiun	41	44
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	2.862	1.680
Pembayaran pensiun	(1.312)	(1.432)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	22.354	18.849

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

	2017	2016
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	19.046	17.834
Pendapatan bunga	1.387	1.458
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	1.709	1.188
Kontribusi peserta program pensiun	41	44
Pembayaran pensiun	(1.312)	(1.432)
Beban administrasi program	(57)	(46)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	20.814	19.046
Status pendanaan	(1.540)	197
Dampak batas atas aset	-	-
(Liabilitas diestimasi manfaat pensiun) beban manfaat pensiun dibayar di muka pada akhir tahun	(1.540)	197

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset program terdiri dari:

	2017		2016	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	1.481	-	1.064	-
Instrumen ekuitas:				
Keuangan	1.463	-	1.039	-
Barang konsumen	1.411	-	1.206	-
Infrastruktur, peralatan dan transportasi	656	-	536	-
Konstruksi, properti dan real estat	363	-	577	-
Industri dasar dan bahan kimia	115	-	130	-
Perdagangan, jasa dan investasi	388	-	216	-
Tambang	92	-	62	-
Agrikultur	46	-	71	-
Industri lainnya	377	-	361	-
Reksadana berbasis saham	1.233	-	1.296	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Obligasi korporasi	-	5.428	-	3.817
Obligasi pemerintah	6.968	-	7.978	-
Reksadana	54	-	30	-
Saham non publik:				
Penempatan langsung	-	237	-	174
Properti	-	188	-	188
Lainnya	-	314	-	301
Jumlah	14.647	6.167	14.566	4.480

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Aset program pensiun termasuk didalamnya saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar Rp469 miliar dan Rp395 miliar, yang mewakili 2,25% dan 2,07% dari total aset program pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing senilai Rp340 miliar dan Rp311 miliar mewakili 1,64% dan 1,63% dari total aset per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp3.039 miliar dan Rp2.600 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) Dapen diatas 105%. Berdasarkan laporan keuangan Dapen pada tanggal 31 Desember 2017, RKD Dapen diatas 105% sehingga, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 24 Juni 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, terdapat kenaikan manfaat pensiun yang diberikan kepada janda/duda/anak dari peserta sebelum 20 April 1992 dari semula 60% menjadi 75% dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan berlaku terhitung sejak 1 Januari 2016. Selain itu, Perusahaan juga memberikan manfaat lain yang hanya diberikan di tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Perusahaan memberikan manfaat lain sebesar Rp6 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Rp3 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir Mei 2016.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, Perusahaan memberikan manfaat lain sebesar Rp4,5 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Rp2,25 juta kepada penerima manfaat pensiun bulanan dari peserta yang berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002 sampai dengan akhir April 2017.

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban manfaat pensiun dibayar di muka pada awal tahun	197	1.329
Beban pensiun berkala bersih	(583)	(640)
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(2.862)	(1.680)
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	<u>1.708</u>	<u>1.188</u>
(Liabilitas diestimasi manfaat pensiun) beban manfaat pensiun dibayar di muka pada akhir tahun	<u>(1.540)</u>	<u>197</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

i. Manfaat pasti (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban jasa	366	363
Beban jasa lalu - perubahan program	94	245
Beban administrasi program	57	46
Beban bunga bersih	66	(14)
Beban pensiun berkala bersih	<u>583</u>	<u>640</u>
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	<u>(26)</u>	<u>(32)</u>
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	<u>557</u>	<u>608</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	163	70
Perubahan asumsi demografik	-	140
Perubahan asumsi finansial	2.699	1.470
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	<u>(1.708)</u>	<u>(1.188)</u>
Jumlah bersih	<u>1.154</u>	<u>492</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pada laporan masing-masing tertanggal 27 Februari 2018 dan 22 Februari 2017 yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Willis Towers Watson ("WTW") (dahulu Towers Watson). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Tingkat diskonto	6,75%	8,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan

Berdasarkan peraturan perusahaan yang diterbitkan tanggal 7 Juni 2017 tentang peraturan dana pensiun dari dana pensiun Telkom, Perusahaan membentuk dana manfaat tambahan yang bersumber dari hasil pengembangan program pensiun paling banyak 10%, dengan ketentuan RKD diatas 105% dan tingkat pengembalian investasi diatas suku bunga aktuaria untuk pendanaan.

	2017
Perubahan liabilitas manfaat pensiun	
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	-
Dibebankan pada laba rugi:	
Beban jasa	-
Beban jasa lalu	657
Beban bunga	-
Rugi aktuaria yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	419
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	1.076

Perubahan liabilitas manfaat tambahan pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	2017
Liabilitas manfaat tambahan pensiun pada awal tahun	-
Beban jasa lalu	657
Rugi aktuaria yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	419
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	1.076

Komponen beban manfaat tambahan pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	2017
Beban jasa	-
Beban jasa lalu	657
Beban administrasi program	-
Beban bunga	-
Beban pensiun	657

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	2017
Rugi aktuaria yang diakui pada tahun berjalan:	
Penyesuaian atas pengalaman	-
Perubahan asumsi demografik	-
Perubahan asumsi finansial	419
Jumlah	419

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

a. *Funded* (lanjutan)

ii. Manfaat tambahan (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat tambahan dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2017, pada laporan tertanggal 27 Februari 2018 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>
Tingkat pengembalian investasi	9,50%-10,25%
Tingkat diskonto	6,75%
Tingkat suku bunga aktuarial pendanaan	9,25%-9,50%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011

b. *Unfunded*

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10 miliar dan Rp9 miliar.

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun dihitung sejak 1 Februari 2009. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, bonus, dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan MPS dan MPP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	2.507	2.500
Beban jasa	51	64
Beban bunga bersih	188	215
Rugi aktuarial diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	100	119
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(462)	(391)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir tahun	<u>2.384</u>	<u>2.507</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban jasa	51	64
Beban bunga bersih	188	215
Jumlah	<u>239</u>	<u>279</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	19	(9)
Perubahan asumsi demografik	-	30
Perubahan asumsi finansial	81	98
Jumlah bersih	<u>100</u>	<u>119</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pada laporan masing-masing tertanggal 27 Februari 2018 dan 22 Februari 2017 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

i. Perusahaan (lanjutan)

b. *Unfunded* (lanjutan)

	2017	2016
Tingkat diskonto	6,00%-6,75%	7,75% - 8,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,10%-8,00%	6,10% - 8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

ii. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya Rp131 miliar dan Rp83 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 untuk program pensiun manfaat pasti:

	2017	2016
Perubahan liabilitas manfaat pensiun		
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	2.034	1.415
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	149	107
Beban bunga	167	130
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	584	392
Pembayaran pensiun	(6)	(10)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	2.928	2.034
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	841	612
Pendapatan bunga	69	56
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	54	100
Kontribusi pemberi kerja	131	83
Pembayaran pensiun	(6)	(10)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	1.089	841
Status pendanaan	(1.839)	(1.193)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	(1.839)	(1.193)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun (lanjutan)

ii. Telkomsel (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	1.193	803
Beban manfaat pensiun	247	181
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	584	392
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(54)	(100)
Kontribusi pemberi kerja	(131)	(83)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	<u>1.839</u>	<u>1.193</u>

Komponen biaya manfaat pensiun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban jasa	149	107
Beban bunga bersih	98	74
Jumlah	<u>247</u>	<u>181</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	(77)	32
Perubahan asumsi finansial	661	360
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(54)	(100)
Jumlah bersih	<u>530</u>	<u>292</u>

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan laporan tertanggal masing-masing 8 Februari 2018 dan 7 Februari 2017 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Tingkat diskonto	7,00%	8,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yakes.

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Perusahaan tidak memberikan kontribusi ke Yakes untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja		
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	13.357	10.942
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa	-	9
Beban bunga	1.115	994
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	1.460	1.828
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(484)	(416)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	<u>15.448</u>	<u>13.357</u>
Perubahan aset program		
Nilai wajar aset program pada awal tahun	11.765	10.824
Pendapatan bunga	979	982
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	909	519
Pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(484)	(416)
Beban administrasi program	(140)	(144)
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	<u>13.029</u>	<u>11.765</u>
Status pendanaan	<u>(2.419)</u>	<u>(1.592)</u>
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	<u>(2.419)</u>	<u>(1.592)</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset program terdiri dari:

	2017		2016	
	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian	Harga kuotasian di pasar aktif	Tidak memiliki harga kuotasian
Kas dan setara kas	1.354	-	894	-
Saham publik:				
Manufaktur dan konsumen	835	-	754	-
Industri keuangan	840	-	540	-
Konstruksi	254	-	351	-
Infrastruktur dan telekomunikasi	350	-	245	-
Grosir	137	-	101	-
Tambang	65	-	27	-
Industri lainnya:				
Jasa	38	-	17	-
Agrikultur	35	-	44	-
Bioteknologi dan industri farmasi	68	-	6	-
Lainnya	1	-	2	-
Reksadana berbasis ekuitas	1.113	-	1.311	-
Instrumen keuangan pendapatan tetap:				
Reksadana pendapatan tetap	7.642	-	7.241	-
Saham non-publik:				
Penempatan privat	-	297	-	232
Jumlah	12.732	297	11.533	232

Aset program Yakes juga termasuk saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar sebesar Rp265 miliar dan Rp217 miliar yang merupakan 2,04% dan 1,84% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp1.748 miliar dan Rp1.357 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	2017	2016
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	1.592	118
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	276	165
Rugi aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	1.460	1.828
Pengembalian aset program (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(909)	(519)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	2.419	1.592

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban jasa	-	9
Beban administrasi program	141	144
Beban bunga bersih	135	12
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala	276	165
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	-	(2)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	276	163

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	2017	2016
(Laba) rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	(1.198)	26
Perubahan asumsi demografik	-	66
Perubahan asumsi finansial	2.658	1.736
Pengembalian aset program pensiun (setelah dikurangi nilai yang termasuk dalam beban bunga bersih)	(909)	(519)
Jumlah bersih	551	1.309

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 pada laporan masing-masing tertanggal 27 Februari 2018 dan 22 Februari 2017 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Tingkat diskonto	7,25%	8,50%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%
Tingkat tren beban kesehatan	7,00%	7,00%
Tahun tingkat tren beban kesehatan tercapai	2018	2017
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Perubahan liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada awal tahun	502	497
Dibebankan pada laba rugi:		
Beban jasa kini	6	7
Beban bunga bersih	36	41
Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	40	20
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(74)	(63)
Liabilitas diestimasi imbalan pasca kerja lainnya pada akhir tahun	<u>510</u>	<u>502</u>

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban jasa	6	7
Beban bunga bersih	36	41
Jumlah	<u>42</u>	<u>48</u>

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Rugi aktuarial yang diakui pada tahun berjalan:		
Penyesuaian atas pengalaman	10	2
Perubahan asumsi demografik	-	0
Perubahan asumsi finansial	30	18
Jumlah	<u>40</u>	<u>20</u>

Penilaian aktuarial untuk program imbalan pasca kerja lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pada laporan masing-masing tertanggal 27 Februari 2018 dan 22 Februari 2017 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan WTW. Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Tingkat diskonto	5,75%	7,75%
Tabel tingkat kematian di Indonesia	2011	2011

d. Kewajiban pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp427 miliar dan Rp332 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp62 miliar dan Rp82 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 23). Rugi aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya adalah masing-masing sebesar Rp72 miliar dan Rp33 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENSIIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

e. Profil jatuh tempo atas liabilitas manfaat pasti

Waktu perkiraan pembayaran manfaat dan rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti untuk 2017 adalah sebagai berikut (dalam miliaran Rupiah):

Jangka waktu	Perkiraan pembayaran manfaat					
	Perusahaan			Telkomsel	Imbalan kesehatan pasca kerja	Imbalan pasca kerja lainnya
	Funded		Unfunded			
Manfaat pasti	Manfaat tambahan					
Dalam 10 tahun kedepan	17.864	602	2.614	2.450	6.579	539
Dalam 10-20 tahun	21.667	937	261	7.997	9.995	124
Dalam 20-30 tahun	18.911	628	42	6.763	9.692	45
Dalam 30-40 tahun	12.971	72	10	1.509	3.710	2
Dalam 40-50 tahun	2.917	22	-	-	343	-
Dalam 50-60 tahun	182	17	-	-	440	-
Dalam 60-70 tahun	6	-	-	-	7	-
Dalam 70-80 tahun	0	-	-	-	-	-
Rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas manfaat pasti	9,52 tahun		4,4 tahun	11,77 tahun	17,64 tahun	3,62 tahun

f. Analisis sensitivitas

Perubahan 1% pada tingkat diskonto dan tingkat gaji akan memberikan dampak pada tahun 2017 atas liabilitas manfaat pasti sebagai berikut:

Sensitivitas	Tingkat Diskonto		Tingkat Gaji	
	Peningkatan 1%	Penurunan 1%	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
	Jumlah peningkatan (penurunan)		Jumlah peningkatan (penurunan)	
Didanai:				
Manfaat pasti	(2.028)	2.409	397	(413)
Manfaat tambahan	(72)	83	N/A	N/A
Tidak didanai	(60)	64	63	(63)
Telkomsel	(290)	331	170	(159)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(2.197)	2.965	1.356	(1.150)
Imbalan pasca kerja lainnya	(17)	18	-	-

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menggunakan metode yang mengekstrapolasi dampak atas liabilitas manfaat pasti sebagai akibat perubahan atas asumsi utama yang muncul pada akhir periode pelaporan.

Hasil sensitivitas tersebut diatas menentukan dampak secara individu atas liabilitas manfaat pasti masing-masing program pada akhir tahun. Dalam kenyataannya, setiap program bergantung pada beberapa hal lain eksternal yang dapat menyebabkan liabilitas manfaat pasti bergerak baik searah maupun berlawanan, dan sensitivitas setiap program dapat berubah secara bervariasi dari waktu ke waktu.

Tidak terdapat perubahan metode dan asumsi yang digunakan dalam menghitung analisis sensitivitas dari periode sebelumnya.

30. PENGHARGAAN MASA KERJA ("LONG SERVICE AWARDS" atau "LSA")

Telkomsel dan Patrakom memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” atau “LSA”) (lanjutan)

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp758 miliar dan Rp613 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp255 miliar dan Rp237 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 23).

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan	Pemegang saham utama	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, dan investasi pada instrumen keuangan
BUMN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, dan pembelian aset tetap
Indosat	Entitas sepengendali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan sewa jaringan, pendapatan atas penggunaan satelit transponder, beban interkoneksi, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, beban operasional dan pemeliharaan, dan beban atas penggunaan data jaringan sistem komunikasi
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa jaringan, beban layanan sirkuit langganan, dan beban pemakaian sistem jaringan komunikasi
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	Entitas sepengendali	Beban listrik, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, investasi pada instrumen keuangan
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kereta Api Indonesia ("KAI")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Pegadaian	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Garuda Indonesia	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Indonesia Comnet Plus ("ICON Plus")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, pendapatan interkoneksi, pendapatan jasa jaringan, dan beban interkoneksi
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	Entitas sepengendali	Beban asuransi satelit dan beban asuransi kendaraan bermotor
PT Adhi Karya Tbk ("Adhi Karya")	Entitas sepengendali	Pembelian material dan jasa konstruksi
INTI	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap dan jasa konstruksi
LEN	Entitas sepengendali	Pembelian aset tetap dan jasa konstruksi
Bank milik negara	Entitas sepengendali	Penghasilan pendanaan dan biaya pendanaan
BNI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
Bank Mandiri	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan biaya pendanaan
PT Mandiri Manajemen Investasi Bahana TCW	Entitas sepengendali Entitas sepengendali	Aset keuangan tersedia untuk dijual Aset keuangan tersedia untuk dijual, dan obligasi dan wesel bayar
PT Sarana Multi Infrastruktur	Entitas sepengendali	Biaya pendanaan
PT Pembangunan Perumahan ("Pembangunan Perumahan")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Pos Indonesia ("Pos Indonesia")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Semen Indonesia ("Semen Indonesia")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Pelabuhan Indonesia ("Pelindo")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Kimia Farma ("Kimia Farma")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya")	Entitas sepengendali	Pendapatan jasa internet dan data dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya
CSM	Entitas asosiasi	Pendapatan atas penggunaan satelit transponder, pendapatan jasa jaringan, dan beban sewa transmisi
Indonusa	Entitas asosiasi	Pendapatan jasa jaringan dan beban komunikasi data
ILCS	Entitas asosiasi	Beban CPE
Teltranet	Entitas asosiasi	Beban CPE
Tiphone	Entitas asosiasi	Distribusi kartu SIM dan vauzer Prabayar
PT Poin Multi Media Nusantara ("POIN")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian <i>handset</i>
PT Perdana Mulia Makmur ("PMM")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian <i>handset</i>
Yakes	Entitas berelasi lainnya	Beban pengobatan
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopeptel")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
PT Sandhy Putra Makmur ("SPM")	Entitas berelasi lainnya	Beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, dan beban jasa pemeliharaan dan kebersihan
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban jasa penagihan, beban jasa-jasa lainnya, distribusi kartu SIM dan vauzer Prabayar, dan pembelian aset tetap
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas berelasi lainnya	Pendapatan jasa jaringan, beban instalasi, beban pemeliharaan, dan pembelian aset tetap
PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia ("Bangtelindo")	Entitas berelasi lainnya	Pembelian aset tetap
Direksi	Personil manajemen kunci	Gaji dan fasilitas
Komisaris	Personil pengawas	Gaji dan fasilitas

Jumlah saldo dari piutang dan utang usaha pada akhir tahun bebas dari bunga dan penyelesaiannya akan terjadi dalam bentuk kas. Tidak ada jaminan yang disediakan atau diterima untuk setiap piutang dan utang usaha dengan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Desember 2017, Grup mencatat adanya penambahan nilai provisi yang diakui selama tahun berjalan dari pihak berelasi sebesar Rp276 miliar. Penilaian ini dilakukan di setiap tahun dengan menilai status masa kini dari piutang yang ada dan historis penagihan piutang yang lalu.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	280	0,22	207	0,18
Entitas sependengali				
Indosat	1.789	1,39	2.167	1,86
BRI	237	0,18	181	0,16
Bank Mandiri	157	0,12	161	0,14
BTN	129	0,10	107	0,09
Pegadaian	115	0,09	93	0,08
BNI	105	0,08	136	0,12
Lintasarta	97	0,08	99	0,09
Pertamina	94	0,07	64	0,06
Garuda Indonesia	55	0,04	75	0,06
ICON Plus	62	0,05	56	0,05
KAI	18	0,01	68	0,06
Lain-lain	523	0,41	451	0,38
Sub-jumlah	3.818	1,89	3.658	3,15
Entitas berelasi lainnya	31	0,02	253	0,22
Entitas asosiasi				
Teltranet	46	0,04	23	0,02
Lain-lain	19	0,01	175	0,15
Sub-jumlah	65	0,05	198	0,17
Jumlah	4.084	3,17	4.316	3,72
	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN				
Entitas sependengali				
PLN	2.269	2,69	1.037	1,38
Indosat	890	1,06	939	1,25
Jasindo	168	0,20	267	0,35
Lain-lain	68	0,08	136	0,18
Sub-jumlah	3.395	4,03	2.379	3,16
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	813	0,96	771	1,02
Kopegtel	713	0,85	533	0,71
POIN	405	0,48	1.459	1,94
PMM	404	0,48	-	-
Yakes	139	0,16	-	-
Lain-lain	81	0,10	206	0,26
Sub-jumlah	2.555	3,03	2.969	3,93

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan):

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN (lanjutan)				
Entitas asosiasi				
Indonusa	264	0,31	145	0,19
Teltranet	123	0,15	49	0,07
ILCS	34	0,04	4	0,01
Lain-lain	4	0,00	5	0,01
Sub-jumlah	425	0,50	203	0,28
Jumlah	6.375	7,56	5.551	7,37

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah penghasilan pendanaan
PENGHASILAN PENDANAAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	0	0,00	2	0,12
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	850	59,27	895	52,16
Lain-lain	35	2,44	5	0,29
Jumlah	885	61,72	902	52,57

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah biaya pendanaan
BIAYA PENDANAAN				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	54	1,95	64	2,28
Entitas sepengendali				
Bank milik negara	819	29,58	1.228	43,72
Sarana Multi Infrastruktur	94	3,39	-	-
Jumlah	967	34,92	1.292	46,00

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
PEMBELIAN ASET TETAP (Catatan 9)				
Entitas sepengendali				
INTI	203	0,79	374	1,42
LEN	67	0,23	114	0,43
Lain-lain	26	0,10	39	0,15
Sub-jumlah	296	1,02	527	2,00
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	130	0,41	198	0,68
Kisel	73	0,23	66	0,23
Bangtelindo	64	0,20	84	0,29
SPM	57	0,18	73	0,25
Lain-lain	59	0,23	45	0,15
Sub-jumlah	359	1,25	466	1,60
Jumlah	655	2,27	993	3,60

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan):

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
DISTRIBUSI KARTU SIM DAN VAUCER				
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	4.181	3,26	4.600	3,95
Tiphone	3.888	3,03	3.441	2,96
Gratika	408	0,32	408	0,35
Jumlah	8.477	6,61	8.449	7,26

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 3)	17.417	8,78	17.477	9,73
b. Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 4)	1.153	0,58	1.204	0,67
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	1.545	0,78	894	0,50
d. Aset lancar lainnya	126	0,06	93	0,05
e. Aset tidak lancar lainnya (Catatan 10)	55	0,03	310	0,17
	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 12)				
Pemegang saham utamai				
Menteri Keuangan	29	0,03	-	-
Entitas sepengendali				
Indosat	225	0,26	275	0,37
BUMN	102	0,12	903	1,22
Sub-jumlah	327	0,38	1.178	1,59
Entitas berelasi lainnya				
Kopegtel	209	0,24	170	0,23
Yakes	55	0,04	47	0,06
Kisel	51	0,04	18	0,02
Bangtelindo	36	0,06	26	0,04
SPM	36	0,06	26	0,04
Lain-lain	151	0,18	80	0,11
Sub-jumlah	538	0,62	367	0,17
Jumlah	869	1,00	314	0,43

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 13)				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	9	0,01	12	0,02
Entitas sepengendali				
BUMN	113	0,13	127	0,17
Bank milik negara	36	0,04	52	0,07
Sub jumlah	149	0,17	179	0,24
Entitas berelasi lainnya				
Kisel	235	0,27	118	0,16
Lain-lain	1	0,00	5	0,01
Jumlah	394	0,46	314	0,43
h. Uang muka pelanggan dan pemasok				
Pemegang saham utama				
Pemerintah	19	0,02	19	0,03
Entitas sepengendali				
PLN	11	0,01	12	0,02
Jumlah	30	0,03	31	0,05
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 15)	1.297	1,50	143	0,19
j. Pinjaman penerusan (Catatan 16a)	1.098	1,27	1.292	1,74
k. Utang bank jangka panjang (Catatan 16c)	7.895	9,14	6.325	8,54
l. Pinjaman lainnya (Catatan 16d)	1.295	1,50	697	0,94

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 16a).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

ii. Indosat (lanjutan)

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan Lintasarta. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

iii. Lain-lain

Kisel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, percetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan vauker pulsa isi ulang.

d. Remunerasi personil manajemen kunci dan pengawas

Personil manajemen kunci adalah Direksi Perusahaan dan personil pengawas adalah Dewan Komisaris.

Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2017		2016	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
Dewan Direksi	175	0,21%	427	0,57%
Dewan Komisaris	65	0,08%	121	0,16%

Jumlah yang disajikan pada tabel diatas adalah jumlah yang diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI

Pada tahun 2017, Manajemen melakukan penataan kembali pengelolaan portofolio bisnis Grup dari pengelolaan menggunakan pendekatan berbasis kelompok pelanggan menjadi pendekatan berbasis *Customer Facing Unit* ("CFU") agar Grup dapat berfokus pada pasar pelanggan yang lebih spesifik. Hal ini diikuti dengan perubahan struktur organisasi Grup untuk mengakomodasi pengambilan keputusan dan melakukan penilaian kinerja berdasarkan pendekatan berbasis CFU. Perubahan manajemen dalam pengelolaan portofolio bisnis Grup dan perubahan struktur organisasi tersebut menyebabkan Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional mengubah penyajian informasi segmen dari informasi segmen yang disajikan sebelumnya dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Informasi segmen dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian informasi segmen pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Grup memiliki lima segmen dilaporkan utama, yaitu *mobile*, *consumer*, *enterprise*, *wholesale and international business* ("WIB"), dan lain-lain. Tidak terdapat segmen operasi yang digabungkan dalam menentukan segmen dilaporkan di atas. Segmen *mobile* menyediakan produk *mobile voice*, SMS, *value added service*, dan *mobile broadband*. Segmen *consumer* menyediakan jasa telepon tidak bergerak, TV berbayar, data, internet, dan jasa telekomunikasi lainnya yang diberikan kepada pelanggan perumahan. Segmen *enterprise* menyediakan solusi *end-to-end* ke pelanggan korporat dan institusional. Segmen WIB menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkuit, satelit, VSAT, *broadband access*, teknologi informasi, data dan jasa internet yang diberikan ke operator telekomunikasi lainnya dan pelanggan internasional. Segmen *digital service* tidak memenuhi kriteria penyajian segmen dilaporkan.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai pasar.

	2017					Total segmen	Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain			
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	90.073	11.105	19.130	7.439	126	127.873	383	128.256
Pendapatan antar segmen	3.086	287	16.801	15.305	602	36.081	(36.081)	-
Jumlah pendapatan segmen	<u>93.159</u>	<u>11.392</u>	<u>35.931</u>	<u>22.744</u>	<u>728</u>	<u>163.954</u>	<u>(35.698)</u>	<u>128.256</u>
Beban								
Beban eksternal	(39.452)	(10.360)	(20.653)	(12.333)	(979)	(83.777)	(572)	(84.349)
Beban antar segmen	(14.382)	(1.563)	(15.027)	(5.611)	(70)	(36.653)	36.653	-
Jumlah beban segmen	<u>(53.834)</u>	<u>(11.923)</u>	<u>(35.680)</u>	<u>(17.944)</u>	<u>(1.049)</u>	<u>(120.430)</u>	<u>36.081</u>	<u>(84.349)</u>
Hasil segmen	<u>39.325</u>	<u>(531)</u>	<u>252</u>	<u>4.800</u>	<u>(321)</u>	<u>43.525</u>	<u>382</u>	<u>43.907</u>
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(15.134)	(6.544)	(3.637)	(7.120)	(11)	(32.447)	(709)	(33.156)
Penyusutan dan amortisasi	(13.560)	(2.839)	(2.136)	(2.382)	(22)	(20.940)	494	(20.446)
Provisi diakui selama periode berjalan	(291)	(385)	(668)	(127)	(2)	(1.473)	(8)	(1.481)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	2016						Penyesuaian dan Eliminasi	Jumlah konsolidasian
	Mobile	Consumer	Enterprise	WIB	Lain-lain	Total segmen		
Hasil segmen								
Pendapatan								
Pendapatan eksternal	83.998	10.410	15.816	5.866	19	116.109	(224)	116.333
Pendapatan antar segmen	2.724	1.877	12.877	14.451	209	32.138	(32.138)	-
Jumlah pendapatan segmen	86.722	12.287	28.693	20.317	228	148.247	(31.914)	116.333
Beban								
Beban eksternal	(37.814)	(11.024)	(17.813)	(10.451)	(417)	(77.519)	381	(77.138)
Beban antar segmen	(12.547)	(2.793)	(9.647)	(4.805)	(12)	(29.804)	29.804	-
Jumlah beban segmen	(50.361)	(13.817)	(27.460)	(15.256)	(429)	(107.323)	30.185	(77.138)
Hasil segmen	36.361	(1.530)	1.233	5.061	(201)	40.924	(1.729)	39.195
Informasi lain								
Pembelian barang modal	(12.568)	(7.085)	(3.036)	(5.729)	(1)	(28.419)	(778)	(29.197)
Penyusutan dan amortisasi	(12.808)	(2.881)	(1.386)	(1.715)	(19)	(18.809)	277	(18.532)
Provisi diakui selama periode berjalan	(221)	(392)	119	(238)	(1)	(733)	(10)	(743)

Penyesuaian dan eliminasi:

	2017	2016
Hasil segmen	43.525	40.924
Rugi usaha unit bisnis	(786)	(339)
Eliminasi dan penyesuaian lainnya	1.168	(1.390)
Laba usaha konsolidasi	43.907	39.195

Informasi Geografis:

Informasi pendapatan di bawah berdasarkan lokasi unit bisnis.

	2017	2016
Pendapatan eksternal		
Indonesia	125.970	114.093
Luar negeri	2.286	2.240
Jumlah	128.256	116.333

Aset operasional tidak lancar untuk tujuan segmen ini terdiri dari aset tetap dan aset takberwujud.

	2017	2016
Aset operasional tidak lancar		
Indonesia	126.938	115.216
Luar negeri	3.233	2.371
Jumlah	130.171	117.587

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap". Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
 - Tarif jelajah, dan/atau
 - Tarif jasa multimedia,
- dengan struktur tarif sebagai berikut:
- Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

Pada tanggal 18 Januari 2017, BRTI melalui suratnya No. 20/BRTI/DPI/I/2017 dan No. 21/BRTI/DPI/II/2017, memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan DPI Perusahaan dan Telkomsel tahun 2014 sampai dengan tarif interkoneksi yang baru ditetapkan.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi, dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi untuk keperluan data, internet, dan jasa teknologi dan informatika, selular, peralatan transmisi dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	6.737
Dolar A.S.	192	2.604
Euro	0,21	3
Jumlah		9.344

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan Konsorsium NEC Corporation dan PT NEC Indonesia	28 Mei 2013	Perjanjian Pengadaan Sulawesi Maluku Papua <i>Cable System</i> (SMPCS) Paket-2
Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia	5 Mei 2014	Perjanjian Pengadaan Dan Pemasangan <i>Outside Plant Optic</i> (OSP-FO) Akses
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	17 November 2015	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform</i> ALCATEL
Perusahaan dan PT Sisindokom Lintas Buana	23 November 2015	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Expand PE VPN</i> Cisco
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	20 November 2015	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet <i>Platform</i> ALU
Perusahaan dan Space System/Loral, LLC	29 Februari 2016	Perjanjian Pengadaan Telkom 4 - <i>Satellite</i>
Perusahaan dan NEC Corporation	12 Mei 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) <i>Indonesia Global Gateway</i>
Perusahaan dan NEC Corporation	18 Juli 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Radio IP Backhaul Node-B</i> Telkomsel <i>Platform</i> NEC
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	10 Oktober 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan (XGPON) <i>10 Gigabyte Capable Passive Optical Network Platform</i> Huawei
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	25 November 2016	Pengadaan dan Pemasangan DWDM <i>Platform</i> Huawei
Perusahaan, PT Fiberhome Technologies Indonesia dan PT Abhimata Citra Abadi	6 Desember 2016	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan XPGON <i>Platform</i> Fiberhome
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	31 Mei 2017	Pengadaan <i>Set Top Box</i> (STB) <i>Platform</i> ZTE
Perusahaan dan PT Asuransi Jasa Indonesia	31 Oktober 2017	Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Peluncuran Satelit Telkom-4
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	1 November 2017	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan STB 4K dan <i>ONT Enterprise Platform</i> ZTE
Perusahaan dan Konsorsium Bisnis Submarine Cable	10 November 2017	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sabang-Lhoksemawe-Medan
Perusahaan dan PT ZTE Indonesia	22 Desember 2017	Perjanjian Pengadaan <i>ONT Retail Platform</i> ZTE
Perusahaan dan PT Lancs Arche Consumma	22 Desember 2017	Pengadaan dan Pemasangan <i>Ekspand Capacity of Network</i> Kapasitas DWDM <i>Platform</i> Coriant for NARU 2017

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian Pembangunan Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei dan PT ZTE Indonesia	Maret dan Juni 2009	Perjanjian Pembangunan Jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN <i>Rollout</i> sebagai Penyedia Jaringan 2G GSM BSS dan 3G UMTS <i>Radio Access Network</i>
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan dan Jasa Terkait <i>Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support</i>
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Technical Support</i> untuk Menyediakan Jasa <i>technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk Pengembangan dan Perpanjangan <i>Customer Relationship Management</i> dan <i>Contact Center Solutions</i>
Telkomsel dan PT Huawei	25 Maret 2013	Perjanjian untuk Dukungan Teknik (TSA) untuk Pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex</i>
Telkomsel dan Wipro Limited, Wipro Singapore Pte. Ltd. dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian Pengembangan dan Pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>
Telkomsel dan PT Dimension Data Indonesia	25 Mei 2016	Perjanjian untuk Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan dan Jasa Terkait <i>Next Generation Convergence RAN Transport Rollout</i>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas digunakan	
				Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BRI	500	14 Maret 2018	Rp	-	306
BNI	500	31 Maret 2018	Rp	-	291
			US\$	0	1
Bank Mandiri	500	23 Desember 2019	Rp	-	390
			US\$	0	1
Jumlah	1.500				989

- (ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan, bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US\$3 Juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018. Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US\$1,5 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bonds*) berlaku sampai dengan 24 Maret 2016. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, bank garansi ini tidak diperpanjang.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp500 miliar. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 25 Maret 2019. Atas fasilitas-fasilitas ini, pada tanggal 31 Desember 2017, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp472 miliar (setara US\$35 juta) sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada tanggal 1 April 2018 dan sebesar Rp20 miliar (setara US\$1,5 juta) sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 (Catatan 34c.i).

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 15 April 2018.

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp2.100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2018. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk menggantikan deposito berjangka yang dijadikan jaminan yang dipersyaratkan untuk program KPU sebesar Rp52,2 miliar (Catatan 34c.iii) dan untuk *surety bond* sebesar Rp1.030 miliar sebagai jaminan pelaksanaan frekuensi radio 2,3 GHz (Catatan 34c.i).

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta dari Bank Mandiri dan telah diperbaharui sesuai dengan adendum V (kelima) pada tanggal 18 Desember 2017 dengan batas kredit maksimum sebesar US\$10 juta. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2018.
- (iv) Pada tanggal 31 Desember 2017, Sigma memiliki fasilitas bank garansi dari BNI sebesar Rp350 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya

(i) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 tanggal 2 November 2015, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.76 tanggal 15 Desember 2010, Telkomsel harus membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900 MHz, dan 1800 MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan sejak 2010.

Di tahun 2017, Pemerintah melalui Menkominfo menetapkan Telkomsel sebagai pemenang lelang spektrum untuk frekuensi 2,3 GHz selebar 30 MHz, dengan harga Rp1,01 triliun.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 1987 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017, yang menggantikan Surat Keputusan No. 42 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014, Menkominfo memberikan wewenang kepada Telkomsel untuk:

- (i) Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz; dan
- (ii) Layanan telekomunikasi dasar.

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, No. 191 Tahun 2013, No. 509 Tahun 2016, dan No. 1896 Tahun 2017, Telkomsel diharuskan, antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Mengeluarkan *performance bond* setiap tahunnya sebesar Rp20 miliar dan Rp1.030 miliar masing-masing untuk pita frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz.

Perjanjian Bersyarat atas Pengalihan Bisnis

Agar memaksimalkan peluang bisnis dalam Grup, Perusahaan merestrukturisasi unit bisnis jaringan telekomunikasi nirkabel tetap dan melakukan pengalihan bisnis dan pelanggan jaringan nirkabel ke pihak Telkomsel. Pada tanggal 27 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Bersyarat atas Pengalihan Bisnis dengan Telkomsel untuk mengalihkan bisnis dan pelanggan tersebut ke Telkomsel (Catatan 4, 9b, 31).

Berdasarkan Surat Keputusan No. 934 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2014, Menkominfo menetapkan untuk menyetujui pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz rentang 880 - 887,5 MHz berpasangan dengan 925 - 932,5 MHz Perusahaan kepada Telkomsel. Telkomsel dapat menggunakan pita frekuensi radio tersebut sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Dalam masa peralihan, Perusahaan masih dapat menggunakan pita frekuensi radio pada rentang 880 - 887,5 MHz berpasangan dengan 925 - 932,5 MHz paling lambat sampai dengan tanggal 14 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Menkominfo Nomor 807/KOMINFO/OJ-SOPI.4/SP.03.03/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dinyatakan bahwa proses migrasi frekuensi 800 MHz telah selesai dan Telkomsel sudah dapat menggunakan frekuensi (880 - 887,5) MHz yang berpasangan dengan (925 - 932,5) MHz secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 21 Oktober 2016, Perusahaan dan Telkomsel menyetujui bahwa Perjanjian Bersyarat atas Pengalihan Bisnis telah selesai.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2018 hingga 2027. Periode sewa menyewa dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum di masa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai <i>lessee</i>	31.218	4.038	15.915	11.265
Sebagai <i>lessor</i>	2.362	737	1.475	150

Sehubungan dengan restrukturisasi bisnis Flexi (Catatan 34c.i), Perusahaan melakukan negosiasi untuk terminasi dini perjanjian sewa operasi, dan telah mencatat provisi untuk terminasi dini sebesar Rp202 miliar dan Rp666 miliar yang disajikan sebagai "Beban lain-lain" di tahun 2016 dan 2015. Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo kewajiban terminasi dini perjanjian sewa operasi sebesar Rp300 miliar telah seluruhnya dibayar di tahun 2017.

(iii) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 17 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait kebijakan program KPU. Peraturan tersebut mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi (dengan mempertimbangkan piutang tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban ketersambungan dan/atau pendapatan yang tidak diperhitungkan sebagai pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi) untuk pengembangan KPU.

Berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 (yang diubah dengan Keputusan No. 03/PER/M.KOMINFO/2/2010 tanggal 1 Februari 2010) yang menggantikan Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Keputusan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007 diantaranya menetapkan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (program KPU), penyedia jasa ditentukan melalui suatu proses seleksi yang dilakukan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang didirikan berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006. Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010, BTIP berubah nama menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI").

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU (lanjutan)

a. Perusahaan

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan senilai Rp322 miliar, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan yang bersifat bergerak senilai Rp528 miliar, yang meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pada tahun 2015, program KPU ini dihentikan. Pada tanggal 8 September 2015, Perusahaan mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") untuk penyelesaian saldo piutang Perjanjian Paket Proyek USO-PLIK dan USO-MPLIK. Pada tanggal 22 September 2016, BANI memutuskan bahwa BPPPTI harus membayar kekurangan pembayaran kepada Perusahaan untuk Paket Proyek USO-PLIK dan USO-MPLIK masing-masing sebesar Rp127 miliar dan Rp342 miliar.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menerima pembayaran dari BPPPTI sebesar Rp278 miliar.

b. Telkomsel

Pada tanggal 16 Januari dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oleh karena itu, Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz - 2.400 MHz.

Selanjutnya, pada tahun 2010 dan 2011, perjanjian-perjanjian tersebut telah diubah, meliputi, antara lain, untuk mengubah harga menjadi Rp1,76 triliun dan untuk mengubah periode pembayaran dari kuartalan menjadi bulanan atau kuartalan.

Pada bulan Januari 2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi dari kementerian untuk menyediakan jasa jaringan tetap lokal dalam program KPU.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iii) KPU (lanjutan)

b. Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tanggal 31 Maret 2014, program KPU untuk paket 1, 2, 3, 6, dan 7 telah dihentikan. Pada tanggal 18 September 2014, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI untuk penyelesaian saldo piutang dari BPPPTI. Pada tanggal 23 Oktober 2015, BANI memutuskan bahwa Telkomsel harus membayar ke BPPPTI atas kelebihan pembayaran oleh BPPPTI terkait program KPU tersebut sebesar Rp94,2 miliar. Telkomsel menerima putusan tersebut dan melakukan pembayaran pada bulan Desember 2015. Pada tanggal 29 Oktober 2015, BPPPTI menginformasikan bahwa ijin operasional untuk program KPU Desa Pinter tidak dapat diterbitkan. Pada Januari 2016, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke BANI untuk menghentikan program KPU.

Pada tanggal 22 Juni 2017, Telkomsel menerima surat keputusan BANI No.792/1/ARB-BANI/2016 yang menginstruksikan BPPPTI membayar kompensasi kepada Telkomsel sebesar Rp217 miliar. Pada Juni 2017, Telkomsel telah melakukan penagihan, namun sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel belum menerima penyelesaian atas tagihan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai tercatat piutang Telkomsel terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah masing-masing sebesar Rp146 miliar dan Rp178 miliar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

35. KONTINJENSI

Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya dilaporkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (“KPPU”) dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Pada tanggal 17 Juni 2008 dalam Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, Perusahaan, Telkomsel beserta tujuh operator domestik lainnya diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan lima operator domestik lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan dan Telkomsel masing-masing mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya juga mengajukan keberatan di berbagai pengadilan. Terkait dengan hal tersebut, maka KPPU meminta Mahkamah Agung untuk mengkonsolidasi kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 2011, Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini. Pada tanggal 27 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 03/KPPU/208/PN.JKT.PST memutuskan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya menang atas kasus ini.

Pada tanggal 23 Juli 2015, KPPU mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terkait perkara praktik kartel SMS. Pada tanggal 29 Februari 2016, Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 memutuskan bahwa KPPU menang atas kasus ini, sehingga Perusahaan dan Telkomsel harus membayar denda masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar. Pada Januari 2017, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar kewajiban tersebut pada kas negara.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	2017			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	154,07	7,47	8,37	2.201
Aset keuangan lancar lainnya	28,34	-	1,14	399
Piutang usaha				
Pihak berelasi	3,02	-	-	41
Pihak ketiga	71,38	-	4,24	1.025
Piutang lain-lain	0,15	-	0,01	2
Aset lancar lainnya	0,10	-	72,33	18
Aset tidak lancar lainnya	4,27	-	0,06	59
Jumlah aset	<u>317,12</u>	<u>7,47</u>	<u>87,09</u>	<u>3.745</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,22)	-	-	(3)
Pihak ketiga	(159,65)	(19,57)	(7,41)	(2.227)
Utang lain-lain	(4,12)	-	(7,41)	(149)
Biaya yang masih harus dibayar	(42,20)	(18,28)	(1,05)	(584)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,48)	-	-	(7)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,59)	(767,90)	-	(292)
Liabilitas lainnya	(21,83)	-	-	(296)
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(65,22)	(4.607,39)	-	(1.557)
Jumlah liabilitas	<u>(304,31)</u>	<u>(5.413,14)</u>	<u>(15,87)</u>	<u>(5.115)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>12,81</u>	<u>(5.405,67)</u>	<u>71,22</u>	<u>(1.370)</u>

	2016			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	204,34	5,99	20,94	3.032
Aset keuangan lancar lainnya	8,81	-	0,35	122
Piutang usaha				
Pihak berelasi	0	-	0	0
Pihak ketiga	106,70	-	3,88	1.488
Piutang lain-lain	0,44	-	0,10	7
Aset lancar lainnya	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	4,09	-	-	56
Jumlah aset	<u>324,38</u>	<u>5,99</u>	<u>25,27</u>	<u>4.705</u>
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,18)	-	(0,01)	(2)
Pihak ketiga	(163,09)	(4,83)	(6,21)	(2.246)
Utang lain-lain	(5,40)	-	(1,18)	(88)
Biaya yang masih harus dibayar	(27,99)	(20,96)	(0,18)	(381)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,48)	-	-	(7)
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10,88)	(767,90)	-	(235)
Liabilitas lainnya	-	-	-	-
Promes	(0,10)	-	-	1
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(64,14)	(5.375,28)	-	(1.482)
Jumlah liabilitas	<u>(272,26)</u>	<u>(6.168,97)</u>	<u>(7,58)</u>	<u>(4.442)</u>
Aset (liabilitas) bersih	<u>52,12</u>	<u>(6.162,98)</u>	<u>17,69</u>	<u>263</u>

*Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2017 menggunakan kurs tanggal 12 Maret 2018, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp67 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

a. Klasifikasi

i. Aset keuangan

	2017	2016
Utang dan piutang		
Kas dan setara kas	25.145	29.767
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	9.564	7.900
Aset keuangan lancar lainnya	1.005	313
Aset tidak lancar lainnya	183	210
Aset keuangan tersedia untuk dijual		
Investasi tersedia untuk dijual	1.541	1.158
Jumlah aset keuangan	37.438	39.348

ii. Liabilitas keuangan

	2017	2016
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai amortisasi		
Utang usaha dan utang lain-lain	15.791	13.690
Beban yang masih harus dibayar	12.630	11.283
Pinjaman		
Utang bank jangka pendek	2.289	911
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.098	1.292
Obligasi dan wesel bayar	8.982	9.323
Utang bank jangka panjang	18.004	15.566
Utang sewa pembiayaan	3.804	4.010
Pinjaman lainnya	1.295	697
Jumlah liabilitas keuangan	63.893	56.772

b. Nilai wajar

	2017	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
				Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar						
Investasi tersedia untuk dijual		1.541	1.541	1.151	17	373
Jumlah		1.541	1.541	1.151	17	373
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan						
Pinjaman						
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)		1.098	1.116	-	-	1.116
Obligasi dan wesel bayar		8.982	10.038	10.038	-	-
Utang bank jangka panjang		18.004	18.108	-	-	18.108
Utang sewa pembiayaan		3.804	3.804	-	-	3.804
Pinjaman lainnya		1.295	1.370	-	-	1.370
Liabilitas lainnya		296	296	-	-	296
Jumlah		33.479	34.732	10.038	-	24.694

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Nilai wajar (lanjutan)

			Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
			Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
2016	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar			
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					
Investasi tersedia untuk dijual	1.158	1.158	1.058	100	-
Jumlah	1.158	1.158	1.058	100	-
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya disajikan					
Pinjaman					
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	1.292	1.312	-	-	1.312
Obligasi dan wesel bayar	9.323	9.684	9.342	-	342
Utang bank jangka panjang	15.566	15.404	-	-	15.404
Utang sewa pembiayaan	4.010	4.010	-	-	4.010
Pinjaman lainnya	697	689	-	-	689
Jumlah	30.888	31.099	9.342	-	21.757

Tidak ada keuntungan atau kerugian atas pengukuran nilai wajar yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017. Tidak ada perpindahan antar hirarki nilai wajar selama tahun 2017.

c. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat ditukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, antara berbagai pihak secara *arm's length transaction*.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (i) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), penyertaan jangka panjang, uang muka dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- (ii) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka panjang (aset tidak lancar lainnya (piutang jangka panjang dan kas dibatasi penggunaannya) dan kewajiban tidak lancar lainnya) dipertimbangkan mendekati nilai bukunya karena diukur berdasarkan hasil dari pendiskontoan arus kas di masa yang akan datang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

- (iii) Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, obligasi korporasi dan Pemerintah, dan obligasi konversi. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar yang tersedia dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik valuasi. Nilai wajar obligasi konversi ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (iv) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- a. Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- b. Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

2. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance and Financial Policy* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance and Financial Policy* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing yang terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	2017		2016	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,26	0,01	0,32	0,01
Liabilitas keuangan	(0,31)	(5,41)	(0,27)	(6,17)
Eksposur bersih	0,05	(5,40)	0,05	(6,16)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Analisis sensitivitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan di bawah, terhadap Rupiah pada 31 Desember 2017 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

	<u>Ekuitas/ laba (rugi)</u>
31 Desember 2017	
Dolar A.S. (penguatan 1%)	(6)
Yen Jepang (penguatan 5%)	(33)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Desember 2017 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan di atas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

b. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada ekuitas.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2017, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijual adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 15 dan 16). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pinjaman bunga tetap	(14.204)	(16.383)
Pinjaman bunga mengambang	(21.267)	(15.416)

Analisis sensitivitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Desember 2017, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp53 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

d. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	2017	2016
Kas dan setara kas	25.145	29.767
Aset keuangan lancar lainnya	2.173	1.471
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	9.564	7.900
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	183	210
Jumlah	37.065	39.348

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan.

Risiko kredit yang berasal dari saldo bank dan institusi keuangan dikelola oleh Grup melalui Unit *Corporate Finance and Financial Policy* sesuai dengan kebijakan tertulis dari Grup. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank milik pemerintah karena bank milik pemerintah memiliki jaringan cabang terluas di Indonesia dan dipertimbangkan sebagai bank terpercaya dikarenakan dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, penempatan ini bertujuan untuk meminimalisasi kerugian secara finansial yang berasal dari potensi kegagalan dalam pembayaran dari bank dan institusi keuangan.

Risiko kredit pelanggan dikelola dengan memantau saldo piutang dan penagihannya secara berkala. Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan yang melebihi 5% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio likuiditas dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

	Nilai buku	Arus kas wajib	2018	2019	2020	2021	2022 dan selanjutnya
31 Desember 2017							
Utang usaha dan lain-lain	15.791	(15.791)	(15.791)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	12.630	(12.630)	(12.630)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	20.293	(24.378)	(7.655)	(5.078)	(4.006)	(2.660)	(4.979)
Obligasi dan wesel bayar	8.982	(18.278)	(929)	(929)	(2.873)	(726)	(12.821)
Utang sewa pembiayaan	3.804	(4.685)	(1.083)	(969)	(866)	(778)	(989)
Pinjaman lainnya	1.295	(1.759)	(220)	(303)	(285)	(266)	(685)
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	1.098	(1.243)	(250)	(222)	(214)	(189)	(368)
Liabilitas lainnya	296	(355)	(17)	(34)	(34)	(135)	(135)
Jumlah	64.189	(79.119)	(38.575)	(7.535)	(8.278)	(4.754)	(19.977)

	Nilai buku	Arus kas wajib	2017	2018	2019	2020	2021 dan selanjutnya
31 Desember 2016							
Utang usaha dan lain-lain	13.690	(13.690)	(13.690)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	11.283	(11.283)	(11.283)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	16.477	(20.421)	(5.875)	(5.635)	(2.883)	(2.565)	(3.463)
Obligasi dan wesel bayar	9.323	(19.670)	(969)	(967)	(1.187)	(3.000)	(13.547)
Utang sewa pembiayaan	4.010	(5.160)	(987)	(892)	(816)	(771)	(1.694)
Pinjaman penerusan <i>(two-step loans)</i>	1.292	(1.487)	(279)	(244)	(216)	(209)	(539)
Pinjaman lainnya	697	(1.007)	(60)	(118)	(164)	(153)	(512)
Jumlah	56.772	(72.718)	(33.143)	(7.856)	(5.266)	(6.698)	(19.755)

Perbedaan antara nilai buku dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga. Nilai bunga dari pinjaman mengambang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif pada tanggal pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	2017		2016	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	2.289	1,78%	911	0,78%
Utang jangka panjang	33.183	25,89%	30.888	26,59%
Total utang	35.472	27,67%	31.799	27,37%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	92.713	72,33%	84.384	72,63%
Jumlah	128.185	100%	116.183	100%

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Grup melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Grup akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Grup juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Grup dan mengkaji efektifitas utang Grup. Grup memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Grup pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Jumlah utang dengan bunga	35.472	31.799
Dikurangi: kas dan setara kas	(25.145)	(29.767)
Utang bersih	10.327	2.032
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	92.713	84.384
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	11,14%	2,41%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 16, Grup dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	5.525	6.199
Pertukaran non-moneter	816	636
Sewa pembiayaan	518	368
Kapitalisasi bunga	328	188
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	846	41

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. Pada tanggal 30 Januari 2018, Perusahaan melakukan perjanjian penyertaan saham baru bersyarat dengan Cellum Global Zrt. ("Cellum") melalui dua tahap. Pada tahap pertama, Metranet akan menyertakan saham baru senilai USD4.000.000 setara kepemilikan 20,4% pada tahap kedua senilai USD2.000.000 sehingga kepemilikan Metranet menjadi 30,4%. Cellum adalah perusahaan penyedia solusi *mobile payment* dan *commerce services*. Penyertaan saham baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis perusahaan, khususnya penguatan ekosistem bisnis *Fin-Tech* Telkom Grup.
2. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak melakukan penarikan dan menandatangani perjanjian fasilitas kredit:
 - a. Pada tanggal 4 Januari 2018 dan 13 Februari 2018, GSD melakukan pencairan atas pinjaman dengan BNI dan Bank Mandiri yang dilakukan di tahun 2017, masing-masing sebesar R68 miliar dan Rp150 miliar.
 - b. Pada tanggal 9 Februari 2018, Telin menandatangani perjanjian kredit dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ sebesar USD10 miliar.
 - c. Pada tanggal 10 Januari 2018, Telkomsel melakukan amandemen atas perjanjian kreditnya dengan Deutsche Bank yang tertanggal 8 April 2015, dengan fasilitas maksimum sebesar Rp750 miliar dengan tujuan pendanaan modal kerja Telkomsel.
 - d. Pada tanggal 26 Februari 2018, Telkom Infratel, Infomedia dan Perusahaan menandatangani perjanjian kredit Joint Borrowing dengan Bank DBS dengan fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp325 miliar, Rp275 miliar, dan Rp50 miliar.
 - e. Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan dan Telin menandatangani perjanjian kredit Joint Borrowing dengan Bank Mandiri dengan fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp775 miliar dan Rp50 miliar.
 - f. Pada tanggal 26 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit Joint Borrowing dengan Bank BNI sebesar Rp825 miliar.
 - g. Pada tanggal 26 Februari 2018, Telin menandatangani perjanjian pinjaman transaksi khusus dengan Bank Mandiri sebesar Rp50 miliar.
3. Pada tanggal 27 Februari 2018, Minister of Communication and Multimedia Malaysia (MCM) telah mengeluarkan persetujuan untuk kepemilikan asing sampai dengan 70% kepada TSGN, melalui amandemen lisensi.
4. Pada tanggal 28 Februari 2018, Metra menandatangani *Conditional Sales Purchase Agreement* dengan pemegang saham PT Swadharma Sarana Informatika ("Swadharma") untuk kepemilikan saham 36,5% senilai Rp219 miliar dan pembelian saham baru melalui peningkatan modal saham senilai Rp178 miliar sehingga kepemilikan Metra menjadi 51%. Swadharma adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sarana teknologi computer, terutama di sektor perbankan. Penyertaan saham baru ini diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* (“IFRS”)

Tabel berikut menyajikan rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 untuk masing-masing perbedaan antara laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK dan IFRS.

	<u>PSAK</u>	<u>REKONSILIASI</u>	<u>IFRS</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	25.145	-	25.145
Aset keuangan lancar lainnya	2.173	-	2.173
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai			
piutang			
Pihak berelasi	1.545	319	1.864
Pihak ketiga	7.677	(319)	7.358
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai			
piutang	342	-	342
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	631	-	631
Aset tersedia untuk dijual	10	-	10
Pajak dibayar di muka	1.947	-	1.947
Tagihan restitusi pajak	908	-	908
Aset lancar lainnya	7.183	-	7.183
Jumlah Aset Lancar	<u>47.561</u>	<u>-</u>	<u>47.561</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	2.148	-	2.148
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	130.171	(299)	129.872
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	3.530	-	3.530
Aset pajak tangguhan - bersih	2.804	-	2.804
Aset tidak lancar lainnya	12.270	-	12.270
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>150.923</u>	<u>(299)</u>	<u>150.624</u>
JUMLAH ASET	<u>198.484</u>	<u>(299)</u>	<u>198.185</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* (“IFRS”) (lanjutan)

	<u>PSAK</u>	<u>REKONSILIASI</u>	<u>IFRS</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	896	1.564	2.460
Pihak ketiga	14.678	(1.564)	13.114
Utang lain-lain	217	-	217
Utang pajak	2.790	-	2.790
Beban yang masih harus dibayar	12.630	-	12.630
Pendapatan diterima di muka	5.427	-	5.427
Uang muka pelanggan	1.240	-	1.240
Utang bank jangka pendek	2.289	-	2.289
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.209	-	5.209
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>45.376</u>	<u>-</u>	<u>45.376</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	933	-	933
Pendapatan diterima di muka	524	-	524
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	758	-	758
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	10.195	-	10.195
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	27.974	-	27.974
Liabilitas lainnya	594	-	594
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>40.978</u>	<u>-</u>	<u>40.978</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>86.354</u>	<u>-</u>	<u>86.354</u>
EKUITAS			
Modal saham	5.040	-	5.040
Tambahan modal disetor	4.931	(478)	4.453
Modal saham yang diperoleh kembali	(2.541)	-	(2.541)
Komponen ekuitas lainnya	387	(157)	230
Saldo laba	84.896	389	85.285
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	92.713	(246)	92.467
Kepentingan nonpengendali	19.417	(53)	19.364
JUMLAH EKUITAS	<u>112.130</u>	<u>(299)</u>	<u>111.831</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>198.484</u>	<u>(299)</u>	<u>198.185</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (“IFRS”) (lanjutan)

	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
PENDAPATAN	128.256	-	128.256
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(36.603)	-	(36.603)
Beban penyusutan dan amortisasi	(20.446)	(31)	(20.477)
Beban karyawan	(13.529)	-	(13.529)
Beban interkoneksi	(2.987)	-	(2.987)
Beban umum dan administrasi	(5.260)	-	(5.260)
Beban pemasaran	(5.268)	-	(5.268)
Keuntungan selisih kurs - bersih	51	-	51
Penghasilan lain-lain	1.039	-	1.039
Beban lain-lain	(1.320)	-	(1.320)
LABA USAHA	43.933	(31)	43.902
Penghasilan pendanaan	1.434	-	1.434
Biaya pendanaan	(2.769)	-	(2.769)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	61	-	61
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	42.659	(31)	42.628
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(9.958)	-	(9.958)
LABA TAHUN BERJALAN	32.701	(31)	32.670
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
<i>Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	24	-	24
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	20	-	20
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi	(1)	-	(1)
<i>Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:</i>			
Rugi aktuarial - bersih	(2.375)	-	(2.375)
Penghasilan komprehensif lain - bersih	(2.332)	-	(2.332)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	30.369	(31)	30.338
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	22.145	(25)	22.120
Kepentingan nonpengendali	10.556	(6)	10.550
	32.701	(31)	32.670
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	19.952	(25)	19.927
Kepentingan nonpengendali	10.417	(6)	10.411
	30.369	(31)	30.338
LABA PER SAHAM DASAR			
(dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	223,55	(0,25)	223,30
Laba bersih per ADS (100 saham Seri B per ADS)	22.354,64	(25,24)	22.329,40

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* ("IFRS") (lanjutan)

a. Hak atas Tanah

Berdasarkan PSAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa.

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Berdasarkan IFRS, entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal, nasional maupun internasional.